



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
 - b. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah, maka perlu disusun rencana pembangunan daerah dalam jangka panjang jangka waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 109);
16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2002 tentang Rencana Strategik Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001-2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 Nomor 30);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 115);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
dan
BUPATI SUKOHARJO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Gubernur dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut RPJP Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
10. Rencana Strategis Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001-2005 yang selanjutnya disebut RENSTRA adalah dokumen perencanaan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan yang substansinya merupakan penjabaran dan penajaman program-program PROPEDA Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001-2005 yang dapat dijangkau oleh/dibiayai dari APBD Kabupaten Sukoharjo.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai RPJP Daerah.
- (2) Rincian dari program pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan.

Pasal 4

RPJP Daerah disusun mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi yang masa berlakunya sama dengan RPJP Nasional yaitu mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

Pasal 5

- (1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah.
- (2) Penyusunan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Tata Cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

RPJM Daerah yang telah ada masih tetap berlaku sesuai masa berlakunya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005-2025

I. UMUM

Mendasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional disusun sebagai penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional, begitu juga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan.

Pembangunan nasional dan daerah adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung terus menerus, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi Kabupaten Sukoharjo untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga masyarakat Kabupaten Sukoharjo dapat mengejar ketertinggalannya dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat dalam pergaulan masyarakat Nasional dan Internasional.

Dengan ditiadakannya Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah dan diperkuatnya otonomi daerah serta desentralisasi pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sangat diperlukan. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang memerintahkan penyusunan RPJP Daerah yang menganut paradigma perencanaan yang visioner, maka RPJP Daerah hanya memuat arahan secara garis besar.

Kurun waktu RPJP Daerah adalah 20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJM Daerah.

RPJP Daerah digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Daerah. Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RPJM Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Daerah memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pemerintah daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJM Daerah sebagaimana tersebut di atas dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian daerah secara menyeluruh serta program SKPD dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Kurun waktu RPJP Daerah sesuai dengan kurun waktu RPJP Nasional, sedangkan periodisasi RPJM Daerah tidak dapat mengikuti periodisasi RPJM Nasional karena pemilihan Kepala daerah tidak dilaksanakan secara bersamaan waktunya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005. Di samping itu, Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dilantik menetapkan RPJM Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Tahun 2005-2025 adalah untuk: (a) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan nasional; (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar Pusat dan Daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

RPJP Daerah diwujudkan dalam visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh pemerintah daerah serta strategi untuk mencapainya. Visi merupakan penjabaran cita-cita pemerintah daerah. Bila visi telah terumuskan maka juga perlu dinyatakan secara tegas misi yaitu upaya-upaya ideal untuk mencapai visi tersebut. Misi ini dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka panjang daerah.

Perencanaan jangka panjang lebih condong kepada kegiatan olah pikir yang bersifat visioner, sehingga penyusunannya akan lebih menitikberatkan pada partisipasi segmen masyarakat yang memiliki olah pikir visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga strategi, individu pemikir-pemikir visioner serta unsur-unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memiliki kompetensi olah pikir rasional dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat banyak sebagai subyek maupun tujuan untuk siapa pembangunan dilaksanakan. Oleh karenanya, rencana pembangunan jangka panjang daerah yang dituangkan dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah adalah produk dari semua elemen masyarakat, pemerintah, lembaga-lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik.

RPJP Daerah harus disusun dengan mengacu pada RPJP Daerah Provinsi dan RPJP Nasional sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya RPJP Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam RPJM Daerah. Mengingat RPJP Nasional menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah, maka Kepala Bappeda dalam menyusun Rancangan RPJP Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda).

Rancangan RPJP Daerah hasil Musrenbangda selanjutnya dikonsultasikan dan dikoordinasikan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Maksud dari RPJP Daerah mengacu RPJP Nasional bukan untuk membatasi kewenangan daerah tetapi agar terdapat acuan yang jelas, sinergi, dan keterkaitan dari setiap perencanaan pembangunan di tingkat daerah berdasarkan kewenangan otonomi yang dimilikinya berdasarkan platform RPJP Nasional, dan RPJP Provinsi. RPJP Daerah dijabarkan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan visi, misi dirinya yang diformulasikan dalam bentuk RPJM Daerah.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Untuk mengakomodir RPJM Daerah yang telah ada agar sesuai dengan RPJP Daerah yang telah disesuaikan dengan RPJP Nasional, maka substansi RPJM Daerah perlu disesuaikan dengan RPJP Daerah tanpa harus menyesuaikan kurun waktu RPJM Nasional.

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 174



**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 1 TAHUN 2011**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2010 – 2015**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
2011**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUHOHARJO NO 1 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2010-2015.....	1
LAMPIRAN I	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud, Tujuan.....	2
1.3. Landasan Hukum	3
1.4. Keterkaitan RPJMD dengan dokumen lain	5
1.5. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	7
2.1. Kondisi Geografis	7
2.2. Perekonomian Daerah	9
2.3. Sosial, Budaya Daerah	20
2.4. Prasarana dan Sarana	30
2.5. Pemerintahan Umum	38
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.....	42
3.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah	42
3.2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah	44
3.3. Pembiayaan	46
3.4. Kebijakan Umum Anggaran	46
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	49
A. Bidang Ekonomi	49
B. Bidang Sosial Budaya	52
C. Bidang Prasarana Wilayah	58
D. Bidang Pemerintahan	66
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	69
5.1. Visi	69
5.2. Misi	70

	5.3. Tujuan dan Sasaran	72
BAB VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	76
	A. Strategi	76
	B. Arah Kebijakan	76
BAB VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	79
BAB VIII	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS	88
BAB IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH.....	90
	9.1. Kaidah Indikator Pengukur	90
	9.2. Indikator Visi	90
	9.3. Indikator Misi	92
BAB X	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN	98
	10.1. Program Transisi	98
	10.2. Kaidah Pelaksanaan	98
LAMPIRAN II		
	MATRIK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	1 - 20
LAMPIRAN III		
	MATRIK INDIKATOR KEGIATAN PER URUSAN BERDASARKAN VISI DAN MISI BUPATI	1 - 97
LAMPIRAN IV		
	MATRIK INDIKATOR KEGIATAN NON URUSAN	1 - 90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sukoharjo 2005–2025, telah memasuki tahapan Pembangunan Lima Tahun Kedua. Tahapan Pembangunan Lima Tahun kedua ini menjadi bagian yang integral dengan visi dan misi dalam pemerintahan Bupati Sukoharjo periode 2010–2015 sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 yang selanjutnya disingkat RPJMD Tahun 2010-2015, merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi, misi dan agenda Kepala Daerah sebagaimana yang disampaikan kepada masyarakat dan para wakil rakyat di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah, RPJM Provinsi dan RPJM Nasional. RPJM Daerah Kabupaten Sukoharjo memuat gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Sukoharjo, gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, isu-isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas, penetapan indikator kinerja daerah, pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

Berdasarkan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, maka RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Penyusunan RPJMD Tahun 2010-2015 ini tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan pada periode waktu sebelumnya dari berbagai rangkaian dan periodisasi kepemimpinan daerah sesuai dengan penekanan dan tema yang didasarkan pada berbagai perspektif, kondisi dan perkembangan pembangunan saat itu. Untuk itulah maka penyusunan RPJMD Tahun 2010-2015 disusun dengan strategi keberlanjutan yaitu dengan prinsip tetap memperhatikan program-program pembangunan yang dilaksanakan pada periode sebelumnya yang telah memberikan sejumlah hasil dan capaian pembangunan kesejahteraan sosial, ekonomi bagi masyarakat.

Capaian-capaian RPJMD Tahun 2010-2015 yang ingin diwujudkan adalah: (1) Pengentasan kemiskinan, (2) Mengurangi kesenjangan terhadap pembangunan wilayah tertinggal/perdesaan, (3) Penuntasan wajib belajar ditingkat dasar,

(4) Peningkatan pendidikan dengan muatan kewirausahaan, (5) Tercapainya masyarakat yang hidup dalam lingkungan yang sehat dan berperilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, memiliki derajat kesehatan yang optimal, (6) Kemandirian pangan dipertahankan pada tingkat aman dan pada kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen kelestarian fungsi daerah tangkapan air, sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, meningkatkan kapasitas aparat desa, mendorong peran serta masyarakat melalui lembaga-lembaga pelayanan dalam berbagai bidang (lembaga pelatihan, penyuluhan layanan sosial dll). Pemetaan sumber daya manusia dengan menerapkan sistem informasi kependudukan dengan berbagai macam atributnya, perluasan dan pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), pembangunan sistem informasi tata ruang dan Sumber Daya Alam (SDA), peningkatan kelestarian lingkungan hidup, termasuk memulihkan yang terlanjur rusak, memacu tumbuhnya formasi rumpun usaha, meningkatkan peran investor dari luar daerah, dan penyederhanaan regulasi usaha, inisiasi energi terbarukan.

Dokumen RPJMD diperlukan agar hasil-hasil pembangunan yang sudah dicapai sebelumnya dapat terjamin keberlanjutannya dan permasalahan serta tantangan yang sedang dihadapi daerah dapat diatasi dengan lebih optimal. Oleh karena itu, dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah perlu dipertimbangkan program pembangunan yang mampu beradaptasi dengan perubahan yang demikian cepat.

Sebagai pijakan perencanaan pembangunan untuk kurun waktu lima tahun kedepan, maka pada RPJMD Tahun 2010-2015 tercantum indikasi rencana program prioritas tahunan daerah yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu lima tahun. Oleh karenanya RPJMD Tahun 2010-2015 menjadi rujukan dalam penyusunan perencanaan tahunan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada kurun waktu 2010-2015. RPJMD memuat tolok ukur kinerja pembangunan pemerintah Kabupaten Sukoharjo selama lima tahun.

1.2. Maksud Dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015 disusun dengan maksud sebagai berikut:

- a) pedoman bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2010-2015.
- b) menjadi acuan pemerintah kabupaten dalam menyusun RKPD Tahun 2011 sampai tahun 2015.

1.2.2 Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a) menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan daerah.
- b) memberikan gambaran umum kondisi daerah terkini dalam konstelasi regional dan nasional.
- c) terciptanya sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar bidang pembangunan.
- d) terciptanya efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.
- e) memberikan pedoman bagi penyusunan RKPD yang memuat strategi dan arah kebijakan, program kegiatan dan prakiraan maju pendanaan.

1.3. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

21. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2009-2029 Provinsi Jawa Tengah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025;

1.4. Keterkaitan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lain.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dapat dikategorikan berdasarkan jangka waktu (Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan Jangka Menengah dan Perencanaan Tahunan), pelaksana (Perencanaan Induk, Perencanaan Managerial, Perencanaan Taktis-Strategis dan Pelaksanaan Teknis Operasional), kewenangan pemerintahan (Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota), dan keruangan (spasial dan aspasial). Perencanaan yang bersifat spasial secara garis besar tertuang dalam Rencana Tata Ruang dari tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten. RPJMD Tahun 2010-2015 mempunyai keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut :

1. RPJMD Tahun 2010-2015, berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten 2005-2025;

2. RPJMD Tahun 2010-2015, memperhatikan RPJM Nasional 2010-2014; dan
3. RPJMD Tahun 2010-2015, mempertimbangkan azas keberlanjutan dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam RPJMD Tahun 2006-2010.

1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I. PENDAHULUAN
- BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
- BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
- BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
- BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
- BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
- BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. KONDISI GEOGRAFIS

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten terkecil setelah Kabupaten Kudus di Propinsi Jawa Tengah. Secara geografis, terletak diantara Bagian ujung timur 110.57° LS, Bagian Ujung Sebelah Barat 110.42° LS, Bagian Ujung Sebelah Utara 7.32° BT, Bagian Ujung Sebelah Utara $7.49^{\circ} 32.00^{\circ}$ BT. Dengan luas 46.666 km^2 , atau $1,43\%$ luas wilayah Propinsi Jawa Tengah. Kabupaten Sukoharjo memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

- Sebelah utara : Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul (DIY) dan Kabupaten Wonogiri
- Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar
- Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten

Secara topografi terdiri atas daerah, dataran rendah dan perbukitan. Daerah dataran rendah merupakan kawasan di bagian Utara, daerah perbukitan merupakan kawasan di bagian Selatan dan Timur.

Sesuai dengan letak geografis, dipengaruhi iklim daerah tropis yang dipengaruhi oleh angin muson dengan 2 musim, yaitu musim kemarau pada bulan April–September dan musim penghujan antara bulan Oktober–Maret. Curah hujan tahunan rata-rata sebesar 2.790 mm , suhu udara berkisar antara 23°C sampai dengan 34°C , dengan kelembaban udara tahunan rata-rata 77% .

Kabupaten Sukoharjo dalam suatu sistem hidrologi, merupakan kawasan yang berada pada aliran sungai Bengawan Solo, mengalir beberapa sungai yang tergolong besar seperti yaitu Sungai Bengawan Solo, Sungai Jlantah, Sungai Proyek Waduk Gajah Mungkur, Sebagai Daerah aliran, dengan sendirinya merupakan daerah limpasan debit air dari sungai yang melintas dan sering mengakibatkan terjadinya banjir pada musim penghujan.

Pola tata guna lahan terdiri dari Perumahan, Tegalan, Kebun campuran, Sawah, Perusahaan, Jasa, Industri dan Penggunaan lainnya dengan sebaran sawah sebesar 21.257 Ha ($45,55\%$), dan lahan bukan sawah seluas 25.409 Ha ($54,45\%$), dari lahan sawah tersebut terdiri dari irigasi teknis seluas 14.900 Ha ($70,09\%$), irigasi setengah teknis seluas 1.902 Ha ($8,95\%$), irigasi sederhana seluas 2.021 Ha ($9,51\%$) dan tadah hujan seluas 2.434 Ha ($11,45\%$).

Pengembangan wilayah Kabupaten Sukoharjo dilakukan melalui pengembangan struktur ruang wilayah, pengembangan pola ruang wilayah dan pengembangan kawasan strategis. Pengembangan struktur ruang wilayah melalui pengembangan pusat pelayanan dan pengembangan prasarana wilayah. Adapun pengembangan pola ruang wilayah melalui pengembangan kawasan lindung dan pengembangan kawasan budi daya. Sedangkan pengembangan kawasan strategis melalui pengembangan kawasan strategis untuk pertumbuhan ekonomi, pengembangan kawasan strategis sosial budaya dan pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.

Pengembangan sistem pusat pelayanan Kabupaten Sukoharjo terdiri atas sistem perkotaan dan sistem perdesaan yang terintegrasi dalam sistem Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Sistem perkotaan meliputi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) terdiri atas Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Kartasura, Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) meliputi Kecamatan Grogol, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi Kecamatan Mojolaban dan Kecamatan Tawang Sari dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi Kecamatan Gatak, Kecamatan Baki, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Bendosari, Kecamatan Nguter, Kecamatan Weru dan Kecamatan Bulu.

Pengembangan sistem perdesaan di Kabupaten Sukoharjo diarahkan pada usaha pemerataan pembangunan dan perkembangan wilayah sebagai salah satu usaha mencegah kesenjangan wilayah. Rencana pengembangan sistem perdesaan di Kabupaten Sukoharjo dilakukan berdasarkan konsep pengembangan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) yaitu satu satuan kawasan perdesaan yang terdiri dari desa pusat (Desa Pusat Pertumbuhan) dan desa-desa lain sebagai pendukungnya (*hinterland*).

Kawasan lindung terdiri dari kawasan hutan lindung berada di Kecamatan Bulu dan kawasan lindung di luar kawasan hutan berada di Kecamatan Bulu, Kecamatan Weru dan Kecamatan Tawang Sari. Kawasan rawan bencana alam banjir di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo, sedangkan bencana tanah longsor di Kecamatan Bulu, Kecamatan Weru.

Kawasan budidaya meliputi kawasan peruntukan hutan produksi berada di Kecamatan Bulu, kawasan peruntukan pertanian tersebar di seluruh Kecamatan, kawasan peruntukan perkebunan di Kecamatan Polokarto, kawasan peruntukan perikanan di sekitar Waduk Mulur, Dam Colo dan bekas pelurusan Sungai Bengawan Solo (Kali Mati), kawasan peruntukan peternakan di Kecamatan Polokarto, Nguter, Bendosari, Weru dan Tawang Sari, kawasan peruntukan

pertambangan di Kecamatan Bendosari, Nguter, Bulu, Weru dan Polokarto, kawasan peruntukan industri terdiri dari wilayah industri tersebar di seluruh wilayah kecamatan dan kawasan industri berada di Kecamatan Nguter, kawasan peruntukan pariwisata terdiri dari kawasan wisata alam berada di Kecamatan Tawang Sari, Bulu dan Mojolaban dan kawasan wisata budaya berada di Kecamatan Kartasura, Grogol, Weru, Bendosari dan Tawang Sari, kawasan peruntukan permukiman terdiri dari permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan.

Kawasan strategis untuk pertumbuhan ekonomi meliputi:

- a. kawasan perkotaan Kartasura dan perkotaan Sukoharjo
- b. kawasan Industri di Kecamatan Nguter
- c. kawasan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sukoharjo

2.2. PEREKONOMIAN DAERAH

2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di samping dapat berdampak pada peningkatan pendapatan, pada akhirnya juga akan berpengaruh pada pendapatan daerah. Semakin mampu menggali potensi perekonomian daerah yang dimiliki akan semakin besar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga mampu meningkatkan keuangan daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo per tahun dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1

Rata-rata pertumbuhan Ekonomi per tahun 2005 – 2009

No	Tahun	Rata-rata Pertumbuhan ekonomi Pertahun (%)
1	2005	4,11
2	2006	4,53
3	2007	5,11
4	2008	4,84
5	2009	4,76

Sumber : Sukoharjo Dalam Angka 2010

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa. Selama kurun waktu lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi. Pertumbuhan ekonomi ini dapat tercapai jika asumsi kondisi keamanan dan ketertiban dapat terjaga secara kondusif, terjadinya peningkatan jumlah investasi, terkendalinya jumlah inflasi dan peningkatan jumlah ekspor.

2.2.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Peningkatan laju pertumbuhan PDRB selama lima tahun mengalami peningkatan rata-rata 4,67% pertahun. Adapun pertumbuhan sektor ekonomi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005–2009 menurut Lapangan usaha adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Sukoharjo
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2005-2009

No	Sektor	2005	2006	2007	2008	2009
1	Pertanian	5,94	3,68	5,30	4,98	4,92
2	Pertambangan dan Penggalian	1,93	1,26	2,70	1,09	1,56
3	Industri Pengolahan	3,46	3,82	4,41	4,47	3,61
4	Listrik, Gas dan Air Minum	1,46	5,88	13,30	5,25	7,80
5	Bangunan	7,26	8,75	5,76	4,74	5,63
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	4,01	4,33	5,09	5,25	4,97
7	Pengangkutan dan Komunikasi	4,98	5,40	5,65	7,35	5,16
8	Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan	3,43	4,40	6,53	7,35	5,97
9	Jasa-jasa	1,22	7,91	5,44	5,81	6,61
PDRB Total		4,11	4,53	5,11	4,84	4,76

Sumber : PDRB Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010

Sedangkan PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku yang menunjukkan nilai PDRB persatu orang penduduk, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan pertumbuhan nyata ekonomi perkapita. Selengkapnya ditunjukkan ke dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Penduduk
Tahun 2005 – 2009

Tahun	PDRB Perkapita (Rp)		Pertumbuhan (%)	
	Harga Berlaku	Harga Konstan 2000	Harga Berlaku	Harga Konstan 2000
2005	6.778.229,98	4.818.034,83	15,38	4,11
2006	7.618.364,55	5.000.457,92	13,20	4,53
2007	8.506.525,96	5.222.682,42	12,37	5,11
2008	9.634.517,19	5.440.423,48	13,99	4,84
2009	10.621.130,54	5.663.606,21	10,94	4,76

Sumber : PDRB Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010

Kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir terbesar adalah sektor Industri Pengolahan sebesar 29,10%, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 25,83%, sektor pertanian sebesar 19,51%, sektor Jasa-jasa 8,58%, sektor pengangkutan dan komunikasi 5,69%, sektor bangunan 5,19%, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 3,57%, sektor listrik, gas dan air bersih 1,75%, dan sektor pertambangan dan penggalian 0,77%.

Tabel 2.4
Distribusi PDRB Kabupaten Sukoharjo menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku Th. 2005 - 2009 (%)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	19,52	19,69	20,13	19,54	19,57
2. Pertambangan & Penggalian	0,92	0,87	0,85	0,81	0,77
3. Industri Pengolahan	30,91	30,46	29,55	29,52	29,10
4. Listrik, Gas & Air Bersih	1,62	1,61	1,75	1,73	1,75
5. Bangunan	4,60	4,78	4,98	5,02	5,19
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	25,74	25,36	25,25	25,78	25,83
7. Pengangkutan & Komunikasi	5,39	5,62	5,66	5,78	5,69
8. Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan	3,24	3,26	3,38	3,47	3,57
9. Jasa - jasa	8,06	8,35	8,45	8,36	8,58
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: PDRB Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010

2.2.3. Pertanian

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten penyangga pangan di Jawa Tengah, sehingga produktivitas tanaman pangan terutama padi terus dipacu. Pada tahun 2009 produktivitas padi berhasil mencapai 70,87 Kw/Ha. Pada tahun 2009 luas panen padi naik sebesar 4,56% dibandingkan tahun sebelumnya.

Jenis ternak yang diusahakan di Kabupaten Sukoharjo adalah ternak besar seperti sapi dan kerbau serta ternak kecil seperti kambing, domba, ayam dan itik.

Data capaian kinerja urusan pertanian disajikan ke dalam tabel berikut:

Tabel 2.5

Data Capaian Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan

No	Data	2006	2007	2008	2009
A	Tanaman Pangan				
	1 Padi				
	Luas Panen (Ha)	49.422	46.171	48.250	50.448
	Produksi (ton)	322.426	322.656	337.244	357.524
	Produktivitas (ku/ha)	65,24	69,88	69,90	70,86
	2 Jagung				
	Luas Panen (Ha)	5.625	5.072	5.122	4.451
	Produksi (ton)	21.415	22.448	30.589	31.651
	Produktivitas (ku/ha)	38,55	44,26	59,72	71,11
	3 Kedelai				
Luas Panen (Ha)	4.317	4.251	3.905	3.996	
Produksi (ton)	7.089	9.187	8.586	9.243	
Produktivitas (ku/ha)	16,43	21,61	21,99	23,13	
B	Perkebunan dan Kehutanan				
	1 Tebu				
	Luas Panen (Ha)	850,86	974,81	975,14	1.006,39
	Produksi (ton)	3.147,89	3.661,19	3.823,52	3.536,45
	Produktivitas (ku/ha)	37,00	37,56	39,21	35,14
	2 Tembakau				
	Luas Panen (Ha)	149,00	157,00	171,00	179,50
	Produksi (ton)	2.408,00	2.844,00	3.256,01	3.929,66
	Produktivitas (ku/ha)	161,61	181,15	190,41	198,97
	3 Wijen				
	Luas Panen (Ha)	50,60	22,20	20,00	60,00
	Produksi (ton)	21,39	15,43	15,24	52,44
	Produktivitas (ku/ha)	4,23	6,95	7,62	8,74
4 Rempah dan Obat					
Luas Panen (Ha)	103,25	70,00	87,54	91,97	
Produksi (ton)	711,00	1.020,88	1.227,47	1.352,60	
Produktivitas (ku/ha)	68,86	145,84	145,93	147,07	
C	Peternakan				
	1 Daging (kg)	6.199.947	5.234.945	5.509.932	6.808.925
	2 Telur (kg)	8.729.153	8.159.661	8.523.662	8.557.717
	3 Susu (lt)	301.337	391.286	799.759	731.037

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo

Konsumsi pangan (beras) di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2009 sebesar 88.343.465 kg. Jika dilihat dari produksi beras tahun 2009 sebesar 357.524 ton maka Kabupaten Sukoharjo masih dalam kategori surplus beras.

2.2.4. Perindustrian dan Perdagangan

Urusan perindustrian dan perdagangan merupakan salah satu prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2006-2010. Jumlah industri di Kabupaten Sukoharjo untuk kategori industri besar sebanyak 58 unit, industri sedang sebanyak 187 unit dan industri kecil sebanyak 16.296 unit. Adapun capaian kinerja urusan perindustrian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.6
Jumlah dan Nilai Produksi Industri di Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2006-2009

No	Uraian	2006	2007	2008	2009
1	Industri Agro dan Hasil Hutan (unit)	271	341	390	452
2	Industri Tekstil dan Aneka (unit)	240	256	280	396
3	Industri kimia, mesin logam,elektronik (unit)	211	226	242	273
4	Indutri besar (unit)	42	49	55	58
5	Industri sedang (unit)	125	141	155	187
6	Industri Rumah Tangga Kecil (unit)	15.523	15.846	16.240	16.296
7	Nilai produksi Industri Besar (ribu)	3.193.846	3.385.476	3.615.689	3.845.901
8	Nilai produksi industri sedang (ribu)	678.937	719.674	762.854	806.035
9	Nilai produksi industri rumah tangga kecil (ribu)	1.181.747	1.323.558	1.485.383	1.647.211
10	Ijin Usaha Industri yang diterbitkan (buah)	77	101	89	119

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sukoharjo

Pertumbuhan sektor usaha perdagangan yang cukup tinggi didukung dengan adanya nilai ekspor yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2009 nilai ekspor menurun dikarenakan adanya krisis global yang sedang melanda perekonomian dunia. Akan tetapi kondisi perekonomian pada tahun 2010 yang mulai stabil diharapkan nilai ekspor Kabupaten Sukoharjo akan kembali menunjukkan penguatan. Data nilai ekspor dalam empat tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Nilai Ekspor Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 -2009

No	Tahun	Nilai Ekspor (dlm US\$)
1	2006	152.998.790,00
2	2007	154.812.066,76
3	2008	158.019.253,58
4	2009	148.994.710,84

Sumber : Disperindag Kab. Sukoharjo

2.2.5. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) - Koperasi

Koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional harus mampu berperan sebagai penopang utama sistem perekonomian daerah. Jumlah Koperasi di Sukoharjo yang sudah berbadan hukum sebanyak 596 unit, yang terdiri dari koperasi yang aktif sebanyak 455 unit dan yang tidak aktif sebanyak 141 unit.

Tabel 2.8

Jumlah Koperasi dan UMKM di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009

No	Uraian		Jumlah
1	Koperasi	Jumlah Koperasi	596
		Koperasi Aktif	455
		Koperasi Tidak Aktif	141
2	UMKM	Jumlah UMKM	28.618
		UMKM Industri Non Pertanian	16.584
		UMKM Industri Pertanian	2.071
		UMKM Perdagangan	9.656
		UMKM Aneka Jasa	307

Sumber : Disperindag Kab. Sukoharjo

Dengan demikian koperasi di Kabupaten Sukoharjo harus mampu memberikan kontribusi yang berarti terhadap produksi daerah, membuka lapangan kerja, memegang peran strategis dalam kegiatan perekonomian dalam rangka mewujudkan ketahanan ekonomi daerah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengaktifkan koperasi yang tidak aktif.

2.2.6. Pariwisata

Kabupaten Sukoharjo mempunyai beberapa objek wisata, untuk objek wisata alam terdiri dari Objek Wisata Batu Seribu, Gunung Sepikul, Dam Colo, Waduk Mulur, Alas Karet Polokarto dan Pandawa *Water World*. Objek wisata ziarah diantaranya Makam Ki Ageng Balak, Pesanggrahan Langenharjo, Makam Ki Ageng Sutowijoyo, Makam Ki Ageng Purwotosidik dan Candi Sonosewu. Objek wisata sejarah diantaranya Petilasan Kraton Pajang dan Petilasan Kraton Kartasura. Selain itu Kabupaten Sukoharjo juga mempunyai wisata Seni Budaya diantaranya Pulung Langse, Kebo Kinul dan Jurit Suropaten,

wisata kuliner yang terdiri dari Jenang Krasikan, Nasi Liwet dan Gempol Pleret serta wisata kerajinan yang berupa Tatah sungging, ukir kaca dan gamelan. Berikut ini adalah capaian urusan pariwisata pada dari tahun 2006-2009:

Tabel 2.9
Data Kepariwisataaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006-2009

No	Uraian	2006	2007	2008	2009
1	Jumlah Obyek Wisata	15	16	16	16
2	Jumlah Hotel	8	8	9	9
3	Jumlah Restoran	19	23	24	38
4	Jumlah Even tahunan	4	4	4	4
5	Jumlah Pengusaha Pariwisata terbina	7	8	8	8

Sumber: Disporaparbud Kabupaten Sukoharjo

2.2.7. Inflasi

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat mengakibatkan tingkat konsumsi meningkat sehingga mendorong terjadinya laju inflasi yang cukup besar, pada tahun 2005 laju inflasi sebesar 14,88%, tahun 2006 turun menjadi 5,73%, tahun 2007 turun menjadi 4,43 persen, pada tahun 2008 naik menjadi 11,39% dan pada tahun 2009 sebesar 2,59%.

Laju inflasi tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 menunjukkan fluktuatif yang cukup lebar. Hal ini disebabkan karena kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga menyentuh US\$.150/barrel (harga BBM dalam negeri naik mencapai 250%) dan krisis keuangan global yang melanda negara-negara Amerika dan Eropa.

Laju inflasi untuk masing-masing kelompok pengeluaran konsumsi tahun 2009 adalah kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 1,40%, Kelompok perumahan sebesar 1,15%, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 5,94%, kelompok sandang sebesar 2,57%, kelompok transportasi dan komunikasi mengalami laju deflasi sebesar 3,06% dan kelompok kesehatan mengalami laju inflasi sebesar 0,74%.

2.2.8. Pendapatan Daerah

Bergulirnya otonomi daerah membawa konsekuensi perubahan manajemen keuangan daerah. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan harapan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien dan efektif.

Selama kurun waktu lima tahun, perhitungan anggaran pendapatan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo selalu memenuhi target. Tahun 2005 mencapai realisasi sebesar 98,8% dari target yang ditetapkan, tahun 2006 mencapai 109,9%, tahun 2007 mencapai 109,2%, tahun 2008 mencapai 107,1%, dan sampai dengan tahun 2009 sudah mencapai 153,1% dari target. Adapun pertumbuhan realisasinya selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan rata-rata sebesar 46.66%. Pada tahun 2006 mengalami kenaikan sebesar 101,22%, tahun 2007 naik sebesar 13,84% dan tahun 2008 naik sebesar 24,92%. Selama lima tahun terakhir Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan rata-rata sebesar 45,19%. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain terdiri dari penerimaan pajak daerah yang mengalami kenaikan rata-rata sebesar 41,15%. Penerimaan pajak daerah itu yang menonjol antara lain adalah Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU), Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir. Selengkapnya sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.10
Perkembangan Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Daerah
Tahun 2006-2010

No	PAJAK DAERAH	TAHUN				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Pajak Hotel	32.250.000	35.965.000	52.500.000	72.620.000	134.863.550
2	Pajak Restoran	246.870.032	249.777.888	236.139.281	300.090.268	411.359.800
3	Pajak Hiburan	42.975.000	44.618.400	51.060.000	56.025.000	68.295.000
4	Pajak Reklame	1.035.985.325	1.188.706.860	1.421.996.725	1.433.384.200	1.842.600.400
5	Pajak Penerangan Jalan	12.169.551.511	12.987.436.668	13.604.996.379	16.086.993.075	19.172.541.281
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	10.218.000	9.100.000	14.056.000	17.850.000	24.197.500
7	Pajak Parkir	18.086.500	17.124.500	40.981.000	36.350.000	34.606.250
	JUMLAH	13.555.936.368	14.532.729.316	15.421.729.385	18.003.312.543	21.688.463.550

Sumber : DPPKAD Kabupaten Sukoharjo

Penerimaan retribusi daerah mengalami kenaikan rata-rata sebesar 44,08%. Kenaikan penerimaan retribusi tersebut antara lain dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pasar, Retribusi IMB, Retribusi Terminal, Retribusi Ijin Gangguan/HO, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Trayek. Selengkapnya penerimaan dari sektor retribusi daerah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.11
Perkembangan Pendapatan Daerah dari Sektor Retribusi Daerah
Tahun 2006-2010

NO	RETRIBUSI DAERAH	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	7.432.069.083	7.378.173.591	8.301.898.547	14.093.887.270	23.272.453.616
2	Retribusi Kebersihan	68.621.950	82.188.650	98.841.600	109.133.100	-
3	Retr. Penggantian B.Cetak KTP & Akta Capil	713.045.000	18.440.500	19.619.500	17.809.000	21.120.000
4	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	600.000	1.000.000	940.000	1.046.000	834.000
5	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	94.250.000	125.000.000	180.176.000	198.000.000	227.700.000
6	Retribusi Pasar	1.580.505.750	1.693.554.900	1.732.608.400	1.849.658.300	2.183.699.974
7	Retribusi Pengujian Kend. Bermotor	442.406.000	450.184.000	461.864.100	448.310.000	444.297.000
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	237.311.000	340.331.600	440.626.438	370.256.300	155.087.000
9	Retribusi Terminal	672.710.150	687.717.900	723.795.300	690.212.300	827.188.500
10	Retribusi Tempat Khusus Parkir	3.000.000	1.500.000	7.050.000	10.800.000	20.000.000
11	Retribusi Tempat Rekreasi & Olah Raga	68.780.000	78.076.050	94.601.750	102.398.750	133.133.000
12	Retribusi penyebrang di Atas Air	15.326.000	18.652.050	22.222.700	24.455.000	28.250.000
13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	155.595.000	205.023.400	251.806.000	272.803.000	336.656.400
14	Retribusi Perijinan Kegiatan Usaha di Bidang pariwisata	1814000	3.971.000	10.231.000	9.235.000	10.980.000
15	Retribusi ijin dibidang perdagangan dan perindustrian	109.735.000	93.050.000	106.000.000	111.950.000	142.775.000
16	Surat Ijin usaha jasa konstruksi	-	11.150.000	86.750.000	40.500.000	56.000.000
17	Retribusi IMB	721.346.740	660.699.645	677.854.865	883.230.900	913.244.350
18	Retribusi Ijin Gangguan/HO	455.212.000	333.534.750	348.685.100	649.687.820	807.621.750
19	Retribusi Ijin Trayek	16.340.800	15.944.500	18.268.800	18.413.400	21.010.000
20	Retribusi ijin ketenagakerjaan	6.780.000	4.425.000	7.962.500	7.212.500	5.305.000
21	Retribusi pelayanan ketenagakerjaan	57.628.000	11.345.000	9.945.000	9.450.500	5.475.000
22	Retribusi ijin pem hardware dan software	1.350.000	300.000	150.000	-	-
23	Retribusi ijin penggunaan tanah	20.872.400	54.299.350	108.014.000	173.903.700	423.570.200
24	Retribusi rumah potong hewan	48.449.750	48.922.300	50.524.250	50.833.000	56.334.000
	JUMLAH	12.923.748.623	12.317.484.186	13.760.435.850	20.143.185.840	30.492.734.790

Sumber : DPPKAD Kabupaten Sukoharjo

Sedangkan penerimaan keuangan daerah Kabupaten Sukoharjo dari Tahun 2006-2009 disajikan kedalam tabel berikut ini:

Tabel 2.12
Penerimaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2006-2010

NO	URAIAN	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
A	BAG. PENDAPATAN ASLI DAERAH					
a.	Pos Pajak Daerah	13.555.956.368,00	14.532.729.316,00	15.421.729.385,00	18.003.312.543,00	21.688.463.781,00
b.	Pos Retribusi Daerah	12.923.748.623,00	12.317.484.186,00	13.760.435.850,00	20.143.185.840,00	31.339.132.636,00
c.	Pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.665.850.283,00	2.140.161.365,00	2.822.801.706,00	3.734.266.687,00	4.378.390.186,00
	Lain-lain PAD yang sah	14.862.525.449,00	10.729.060.497,69	9.780.094.495,69	6.961.763.270,00	7.861.077.801,00
	JUMLAH	44.008.080.723,00	39.719.435.364,69	41.785.061.436,69	48.842.528.340,00	65.267.064.404,00
B	BAG. DANA PERIMBANGAN					
a.	Pos Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	31.537.109.068,00	35.458.997.851,00	38.886.913.735,00	43.301.742.011,00	54.082.821.912,00
b.	Pos Dana Alokasi Umum	421.438.000.000,00	460.662.000.000,00	498.935.688.000,00	524.980.151.000,00	516.588.118.000,00
c.	Pos Dana Alokasi Khusus	22.849.000.000,00	42.445.000.000,00	50.547.000.000,00	63.107.000.000,00	49.452.900.000,00
d.	Transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi			44.314.560.510,00		
	JUMLAH	475.824.109.068,00	538.565.997.851,00	588.369.601.735,00	631.388.893.011,00	620.123.839.912,00
C	BAG. LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
a.	Pos Lain - lain Pendapatan Daerah yang sah	29.438.975.972,00	37.483.682.671,00	13.146.550.250,00	52.720.314.942,00	113.041.710.888,00
	JUMLAH	29.438.975.972,00	37.483.682.671,00	13.146.550.250,00	52.720.314.942,00	113.041.710.888,00
	JUMLAH PENERIMAAN KEUANGAN					
		549.271.165.763,00	615.769.115.886,69	643.301.213.421,69	732.951.736.293,00	798.432.615.204,00

Sumber: DPPKAD Kab. Sukoharjo

2.2.9. Belanja Daerah

Rincian perhitungan anggaran belanja (Tahun 2006 – 2009) terdiri dari Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan Publik. Pada tahun 2005 prosentase Perhitungan Belanja Aparatur Daerah terhadap anggaran adalah sebesar 98,43%, tahun 2006 sebesar 96,17 % dan sampai dengan tahun 2007 mencapai 66,94 % dari target satu tahun. Sedangkan prosentase Perhitungan Belanja Pelayanan Publik terhadap anggaran pada tahun 2008 adalah sebesar 98,80 %.

2.2.10. Investasi

Nilai investasi PMA (Penanaman Modal Asing) pada Tahun 2008 dibandingkan Tahun 2009 mengalami kenaikan dari US\$ 163.065.735,- menjadi US\$ 163.315.735. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) juga mengalami kenaikan dari Rp.524.445.000.000,- pada Tahun 2008 menjadi Rp

56.945.000.000,- pada Tahun 2009. Sedangkan dari daya serap tenaga kerja untuk PMA naik dari 21.738 orang pada tahun 2008 menjadi 21.839 orang pada tahun 2009. Daya serap tenaga untuk PMDN meningkat dari 14.659 orang tahun 2008 menjadi 14.819 orang pada tahun 2009. Kenaikan investasi ini tidak lepas dari kondusifnya iklim investasi, Selengkapnyanya perkembangan jumlah dan nilai investasi dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.13
Perkembangan Jumlah dan Nilai Investasi

Tahun	Jumlah		Nilai Investasi		Tenaga Kerja	
	PMA	PMDN	PMA (US\$)	PMDN (Rp. Juta)	PMA	PMDN
2006	7	13	157.041.113	506.011	21.240	15.083
2007	7	13	162.082.891	524.364	22.398	14.991
2008	8	12	163.065.735	524.445	21.738	14.659
2009	8	14	163.315.735	556.945	21.739	14.819

Sumber : Kantor Penanaman Modal Kab. Sukoharjo

2.2.11. Pinjaman Daerah

Dalam melaksanakan pembangunan dibutuhkan sumberdaya yang cukup tinggi, terutama sumber pembiayaan, sementara pembiayaan yang tersedia baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah belum mencukupi.

Kekurangan pembiayaan pembangunan tersebut dapat diperoleh melalui berbagai cara, salah satu alternatif yang dilaksanakan adalah dengan melakukan pinjaman dari pihak ke tiga atau lembaga-lembaga keuangan.

Total kewajiban pinjaman Pemerintah sejumlah Rp.852.711.529,27 yang terdiri dari pokok pinjaman sebesar Rp.601.591.455,01 ditambah bunga, bunga masa tenggang, biaya profisi dan administrasi serta denda sebesar Rp. 251.120.074,26. Secara rinci posisi pinjaman daerah sampai dengan tahun 2009 sebagai berikut :

Tabel 2.14

Posisi Pinjaman Daerah per 31 Desember 2009

No	Uraian	Tahun Anggaran	Masa Pinjaman	Pokok Pinjaman	Kewajiban	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Pinjaman Urban V Pandanaran, IBRD-RDI2408	-	-	-	-	-
2	Pinjaman Urban Transport IBRD-RDI-2817	-	-	-	-	-
3	Pinjaman SSUDP/P3KT	1995/1996	20 tahun (termasuk masa tenggang 5th)	601.591.455,01	245.777.103,86 5.342.970,40	Bunga Jasa Bank
4	Pembelian Gedung Dinas	-	-	-	-	-
	JUMLAH			601.591.455,01	251.120.074,26	

Sumber : DPPKAD Kabupaten Sukoharjo

2.3. SOSIAL BUDAYA DAERAH

2.3.1. Jumlah, Perkembangan, dan Kepadatan Penduduk

Perkembangan jumlah penduduk dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,52 %, pada tahun 2005 jumlah penduduk sebesar 821.213 jiwa, tahun 2006 jumlah penduduk sebesar 826.289 jiwa, tahun 2007 sebesar 831.613 jiwa, tahun 2008 sebesar 837.279 jiwa dan pada tahun 2009 sebesar 843.127 jiwa. Kenaikan pertumbuhan penduduk ini disamping karena tingkat kelahiran, juga disebabkan oleh migrasi dari daerah *hinterland* sebagai konsekuensi kota yang sedang berkembang. Tingkat kelahiran dalam lima tahun terakhir mengalami kenaikan rata-rata pertahun sebesar 2,33%, pada tahun 2005 sebesar 9.014, tahun 2006 sebesar 8.658 jiwa, tahun 2007 sebesar 9.451 jiwa, tahun 2008 sebesar 10.321 jiwa dan pada tahun 2009 sebesar 10.491 jiwa

Tabel 2.15

Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Sukoharjo

No	Kecamatan	2006		2007		2008		2009	
		Jml Pendd.	Kpdtn	Jml Pendd.	Kpdtn	Jml Pendd.	Kpdtn	Jml Pendd.	Kpdtn
1	Weru	66.297	1.579	66.565	1.586	66.743	1.590	66.833	1.592
2	Tawang Sari	57.858	1.447	58.151	1.455	58.450	1.462	58.793	1.471
3	Bulu	51.633	1.177	51.584	1.176	51.600	1.176	51.661	1.178
4	Nguter	64.249	1.171	64.291	1.171	64.364	1.173	64.435	1.174
5	Sukoharjo	82.545	1.852	83.224	1.867	83.948	1.883	84.742	1.901
6	Bendosari	65.750	1.241	66.256	1.250	66.823	1.261	67.411	1.272
7	Kartasura	88.348	4.594	88.968	4.627	90.011	4.681	91.070	4.736
8	Gatak	47.286	2.429	47.694	2.450	48.058	2.468	48.537	2.493
9	Baki	51.513	2.345	51.868	2.361	52.337	2.382	52.900	2.408
10	Grogol	99.989	3.333	101.123	3.371	102.307	3.410	103.232	3.441
11	Mojolaban	77.269	2.174	78.022	2.195	78.465	2.208	79.039	2.224
12	Polokarto	73.552	1.183	73.867	1.188	74.173	1.193	74.474	1.198

Sumber : Sukoharjo Dalam Angka 2010

Dari data tersebut di atas persebaran penduduk tidak merata, kepadatan penduduk tertinggi berada di pusat-pusat kota yang meliputi Kecamatan Kartasura, Grogol, Gatak, Baki, Mojolaban dan Sukoharjo. Sedangkan wilayah Kecamatan Nguter dan Kecamatan Bulu mempunyai jumlah penduduk terkecil, dengan kepadatan penduduk dibawah 1.200 orang tiap km². Kecamatan yang terpadat penduduknya adalah Kecamatan Kartasura dengan tingkat kepadatan sebesar 4.736 jiwa tiap km².

Berdasarkan perhitungan IPM oleh BPS tahun 2009, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat 73,29 dengan angka tersebut Kabupaten Sukoharjo menduduki urutan ke 118 dari 497 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk tingkat Jawa Tengah menduduki urutan 10. Kondisi tersebut merupakan salah satu indikator terhadap kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Sukoharjo.

2.3.2. Pendidikan

Pembangunan Pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu menghadapi setiap perubahan dan diharapkan dapat membentuk manusia seutuhnya yaitu beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, sehat jasmani dan rohani, mandiri, bertanggungjawab dan memiliki

etos kerja yang tinggi. Sasarannya adalah terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua masyarakat, tercapainya efektif dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, serta tercukupinya sarana dan prasarana pendidikan. Beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan pendidikan dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan angka putus sekolah. Selama lima tahun terakhir Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) sebagai berikut:

Tabel 2.16
APK masing-masing Jenjang Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2005 – 2009 (%)

Pendidikan	Tahun 2005		Tahun 2006		Tahun 2007		Tahun 2008		Tahun 2009	
	APK	APM	APK	APM	APK	APM	APK	APM	APK	APM
SD/MI	99,26	84,94	98,38	83,46	116,64	97,50	118,25	100,86	115,78	99,52
SMP/ MTs	82,64	59,31	81,04	60,61	98,76	74,20	106,89	99,46	100,57	73,37
SMU/SMK /MA	49,24	36,46	49,21	35,55	58,42	41,18	63,29	43,82	64,96	46,00

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Sukoharjo

Sedangkan Angka Putus Sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.17
Angka Putus Sekolah Tahun 2005 – 2009

	Prosentase Angka Putus Sekolah		
	SD/MI	SLTP/MTs	SMU/SMK/MA
Tahun 2005	0,09	0,44	1,40
Tahun 2006	0,03	0,51	1,32
Tahun 2007	0,04	0,39	1,18
Tahun 2008	0,06	0,40	1,07
Tahun 2009	0,01	0,12	0,82

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Sukoharjo

Dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan di Kabupaten Sukoharjo baik sekolah negeri maupun swasta terdata sebagai berikut:

Tabel 2.18
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang pendidikan

Jenjang Pend.	Jumlah Sekolah	
	Negeri	Swasta
TK	3	335
SD	465	87
SMP	45	30
SMU	11	13
SMK	3	23
PT	2	3

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Sukoharjo

2.3.3. Kesehatan

Derajat Kesehatan masyarakat selama lima tahun terakhir menunjukkan perubahan yang positif, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator keberhasilan bidang kesehatan. Perubahan derajat kesehatan masyarakat antara lain didukung oleh tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, ketersediaan tenaga medis dan paramedis, manajemen, kualitas pelayanan, dan kesadaran masyarakat.

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Sukoharjo berada di atas angka harapan hidup tingkat Nasional. Pada tahun 2006 Angka Harapan Hidupnya mencapai 68,9 tahun, pada tahun 2007 naik menjadi 71 tahun, pada tahun 2008 tetap menjadi 71 tahun dan pada tahun 2009 masih 71 tahun. Sedangkan AHH Nasional pada tahun 2009 hanya 69,0 tahun. Angka Kematian Bayi di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2009 sebesar 10,36, angka tersebut naik jika dibandingkan tahun 2006 sebesar 7,9. Indikator lainnya adalah jumlah kasus gizi buruk secara prosentase mengalami penurunan. Dari Tahun 2006 sebesar 0,03 mencapai 0,028 pada tahun 2009. Sedangkan untuk indikator Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2009 sebesar 81,0 mengalami penurunan dari tahun 2008 sebesar 80,81.

Tabel 2.19
Usia Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu dan Prosentase Balita Gizi Buruk Tahun 2006 – 2009

	Usia Harapan Hidup	Angka Kematian Bayi	Angka Kematian Ibu	% Balita Gizi Buruk
Tahun 2006	68,9	7,9	55,2	0,03
Tahun 2007	71	5,2	93,8	0,04
Tahun 2008	71	9	81,0	0,033
Tahun 2009	71	10,36	80,81	0,028

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sukoharjo

Cakupan pelayanan kesehatan telah menjangkau ke seluruh wilayah, hal ini dapat dilihat dari jumlah fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Jumlah Rumah Sakit sebanyak 8 buah, Rumah Sakit Bersalin 25 buah, Puskesmas 12 buah. Selengkapnya terinci ke dalam tabel berikut:

Tabel 2.20
Perkembangan Sarana Kesehatan di Kabupaten Sukoharjo

No	Jenis Fasilitas	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Puskesmas	21	21	21	21	12
2.	Puskesmas Pembantu	47	47	47	48	57
3.	RS Negeri	2	2	2	2	2
4.	RS Swasta	4	4	5	6	6
5.	Rumah Bersalin	30	32	26	26	25
6.	Balai Pengobatan Negeri dan swasta	18	22	32	23	36

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sukoharjo

Sedangkan untuk ketersediaan tenaga medis dan paramedis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.21
Jumlah Tenaga Medis di Kabupaten Sukoharjo

Tenaga Kesehatan (orang)	Tahun			
	2006	2007	2008	2009
a. Dokter Umum	137	146	147	114
b. Dokter Spesialis	166	166	165	119
c. Dokter Gigi	39	42	43	32
d. Perawat	829	840	839	1.182
e. Bidan	389	401	403	535
f. Ahli Kesehatan Masyarakat	32	32	33	50
g. Apoteker	88	88	89	129
h. Ahli Gizi	33	33	34	38
i. Analisis Laboratorium	63	63	62	88
j. Ahli Rontgen	30	30	29	37
k. Ahli Penyehatan Lingkungan	30	30	31	34
l. Bidan Desa	110	110	110	117

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Sukoharjo

Untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan, sejak tahun 2008 Pemerintah telah mengalokasikan dana untuk pembiayaan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin melalui Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Jamkesmas diberikan kepada masyarakat miskin yang masuk dalam daftar kuota yang telah diusulkan oleh Bupati dan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Sedangkan masyarakat miskin yang belum masuk kuota, menjadi tanggungan Bupati. Untuk membiayai masyarakat miskin non kuota maka Pemerintah Kabupaten sudah menyediakan anggaran melalui Jaminan Kesehatan masyarakat Daerah (Jamkesda).

Di Kabupaten Sukoharjo, jumlah sasaran Pembiayaan Kesehatan Jamkesmas sebanyak 275.262 jiwa, masyarakat miskin dengan jaminan sebesar Rp 5.000 per orang/bulan dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Selain itu, terdapat sekitar 85.000 jiwa masyarakat miskin yang ditanggung oleh Jamkesda Kabupaten Sukoharjo, melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dan Rumah Sakit Umum Daerah Sukoharjo menyediakan anggaran kesehatan untuk masyarakat miskin yang tidak dibiayai Jamkesmas, sebesar Rp 1.900.000.000,- pada tahun 2009, dan Rp. 1.700.000.000 tahun 2010.

Pencegahan dan penanggulangan penyakit merupakan satu hal yang penting dalam meningkatkan derajat kesehatan manusia, salah satunya dengan imunisasi. Pada tahun 2009 di Kabupaten Sukoharjo penduduk yang diimunisasi sebanyak 57.251 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.22
Banyaknya Penduduk yang Imunisasi di Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2006-2009

No	Vaksin	2006	2007	2008	2009
1	BCG	13.270	13.323	13.423	13.722
	DPT Bayi				
2	DPT I	13.109	13.244	13.353	13.842
3	DPT III	13.420	13.646	13.320	13.801
	Ibu Hamil				
4	TFT I	13.548	14.313	64.316	8.218
5	TFT II	12.755	13.597	49.632	7.668
	JUMLAH	66.102	68.123	154.044	57.251

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

2.3.4. Ketenagakerjaan

Selama lima tahun terakhir berturut-turut penduduk usia produktif mengalami peningkatan rata-rata pertahun sebesar 1,79%. Pada tahun 2006 sebesar 637.458 jiwa, tahun 2007 sebesar 651.550 jiwa, tahun 2008 sebesar 660.567 jiwa. Sekitar 78,89% penduduk Kabupaten Sukoharjo adalah penduduk usia produktif (15 - 64) tahun dan penduduk usia tidak produktif (0-14 dan 65 tahun keatas) sebesar 21,11%.

Tabel 2.23
Pencari Kerja dan Pengangguran

Tahun	Pencari Kerja	Pengangguran	Total Pencari Kerja & Pengangguran
2005	10.900	41.769	52.669
2006	10.387	13.834	24.221
2007	9.173	16.182	25.355
2008	15.382	20.720	36.102
2009	14.727	20.823	35.550

Sumber : Disnakertrans Kab. Sukoharjo

Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo berdasarkan usia disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.24
Jumlah Penduduk berdasarkan Usia

Tahun	Usia			Jumlah
	0 - 14	15 - 64	65 +	
2005	187.635	569.724	63.854	821.213
2006	188.831	563.272	74.186	826.289
2007	190.063	587.096	64.454	831.613
2008	176.712	584.603	75.964	837.279
2009	175.966	592.511	74.650	843.127

Sumber : Sukoharjo Dalam Angka 2010 Diolah

Dari data tersebut diketahui bahwa angka beban tanggungan tiap tahun sebesar 42,29% yang berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar 43 penduduk usia tidak produktif.

Struktur Penduduk menurut tenaga kerja dapat digambarkan berdasarkan pada penduduk usia kerja. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2005 sebanyak 569.724 orang, turun menjadi 563.272 pada tahun 2006, naik kembali menjadi

587.096 orang pada tahun 2007, 584.603 orang pada tahun 2008 dan 592.511 orang pada tahun 2009.

Dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yakni perbandingan antara penduduk usia kerja dengan jumlah angkatan kerja, mulai tahun 2005 sampai dengan 2009 kecenderungan mengalami penurunan. Pada tahun 2005 angka TPAK sebesar 92,67 %, tahun 2006 sebesar 97,54%, tahun 2007 sebesar 97,24%, tahun 2008 sebesar 96,46% dan pada tahun 2009 sebesar 96,60%.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perlunya peningkatan lapangan pekerjaan yang cukup guna menampung banyaknya penduduk usia kerja yang tiap tahun semakin meningkat.

2.3.5. Kesejahteraan Sosial

Kabupaten Sukoharjo memiliki permasalahan sosial yang cukup kompleks. Hal ini ditandai dengan adanya golongan yang kurang beruntung seperti gelandangan, pengemis, tuna susila, anak jalanan, anak terlantar dan lain-lain yang dikategorikan sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Walaupun ditengarai sebagian besar berasal dari daerah lain tetapi pada kenyataannya mereka berada di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Hal tersebut menjadikan kesan yang kurang baik bagi Kabupaten Sukoharjo.

Jumlah penduduk di kabupaten Sukoharjo masih cukup besar. Pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin sebesar 327.966 jiwa atau sekitar 37% dari jumlah penduduk. Peningkatan tersebut dipicu dengan adanya kondisi perekonomian yang belum pulih seperti sebelum krisis dan adanya penduduk pendatang yang pada umumnya dari lapisan ekonomi lemah.

Tabel 2.25

Perkembangan Penduduk Miskin dan (PMKS) Kabupaten Sukoharjo

Tahun	Penduduk Miskin (jiwa)	Pengemis	Waria	Wanita Tuna Susila	Anak jalanan dan Anak Terlantar
2005	239.882	46	-	72	2.161
2006	260.356	75	2	96	2.571
2007	360.591	46	-	72	2.539
2008	353.412	91	2	96	2.227
2009	353.412	119	4	97	2.426
2010	327.966	119	4	97	2.426

Sumber : Bappeda dan Dinas Sosial Kab. Sukoharjo

Dari data tersebut menunjukkan bahwa masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Sukoharjo merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Penanganan terhadap penyandang masalah sosial sudah dilakukan dan melibatkan banyak pihak, namun usaha tersebut hasilnya belum sesuai yang diharapkan.

Perkembangan fasilitas sosial yang tersedia di Kabupaten Sukoharjo semakin beragam, sejalan dengan meningkatnya peran serta masyarakat dalam penyediaan fasilitas sosial. Jumlah dan jenis perkembangan fasilitas sosial yang ada di Kabupaten Sukoharjo meliputi Panti Jompo sebanyak 3 buah panti asuhan sebanyak 17 buah, dan yayasan sosial sebanyak 8 buah.

Tabel 2.26
Perkembangan Panti Jompo, Panti Asuhan, Rumah Singgah dan Yayasan Sosial di Kabupaten Sukoharjo

Tahun	Jumlah panti jompo	Jumlah panti asuhan	Yayasan Sosial
2005	3	13	8
2006	3	18	8
2007	3	18	8
2008	3	17	10
2009	3	17	8

Sumber : Dinas Sosial Kab. Sukoharjo

Yayasan-yayasan sosial tersebut juga memberikan pondok-pondok singgah dengan maksud untuk membantu anak dan remaja penyandang tuna wisma dan memberi fasilitas singgah, pendidikan, pelatihan, dan perlindungan.

Bagi penyandang cacat di Kabupaten Sukoharjo mendapatkan perlindungan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyandang Cacat serta Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturtan Daerah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009. Jumlah penyandang cacat di Kabupaten Sukoharjo tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Cacat Tubuh : 4.101 orang
2. Cacat Tuna Wicara : 3.239 orang
3. Cacat Netra : 2.165 orang
4. Cacat Mental : 601 orang
5. Cacat Ganda : 2.699 orang

2.3.6. Pemberdayaan Masyarakat

Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan). PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. PNPM Mandiri Perdesaan merupakan kelanjutan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Di antara keberhasilan PPK adalah penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, dan keberhasilannya menumbuhkan kolektivitas dan partisipasi masyarakat

Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sukoharjo sejak Tahun 2006 sampai Tahun 2010 (selama 5 Tahun Anggaran) adalah sebesar Rp. 43.550.000.000,-. Dari 9 (Sembilan) lokasi Kecamatan yang pernah menerima Program, sejak Tahun 2007 tinggal 6 (enam) Kecamatan yang menjadi sasaran program PNPM Mandiri Perdesaan. Sedangkan untuk 3(tiga) Kecamatan yang lain menjadi lokasi program PNPM Mandiri Perkotaan. Untuk rincian alokasi dana BLM masing-masing Kecamatan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.27
Alokasi Dana BLM Per Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2006-2010

No	Kecamatan	PPK (dalam ribuan)	PNPM- PPK (dalam ribuan)	PNPM- MD (dalam ribuan)	PNPM- MD (dalam ribuan)	PNPM- MD (dalam ribuan)	Total BLM (dalam ribuan)
		2006	2007	2008	2009	2010	s/d 2010
1	Bulu	1.000.000	1.000.000	1.000.000	900.000	2.000.000	5.900.000
2	Weru	-	1.250.000	1.500.000	2.000.000	1.500.000	6.250.000
3	Gatak	750.000	-	-	-	-	750.000
4	Bendosari	1.000.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	8.000.000
5	Tawang Sari	1.000.000	1.000.000	1.000.000	900.000	2.000.000	5.900.000
6	Mojolaban	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000
7	Polokarto	1.000.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	8.000.000
8	Nguter	1.000.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	8.000.000
9	Baki	0	0	0	0	0	0
	Total Kab.	6.750.000	6.250.000	8.000.000	9.800.000	13.000.000	43.800.000

Sumber: BPMD Kab. Sukoharjo

Pemberdayaan masyarakat melalui program Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) merupakan salah satu wujud peran serta masyarakat dalam

pembangunan, khususnya bidang kesehatan dengan menciptakan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Posyandu di Kabupaten Sukoharjo semakin berkembang, dimana terjadi peningkatan strata, menjadi strata Posyandu yang mandiri, dalam kegiatannya telah terintegrasi dengan Bina Keluarga Balita, UP2K(Usaha Perbaikan Gizi Keluarga), Paud (Pendidikan Anak Usia Dini) dan kegiatan-kegiatan lain yang biasa dipadukan dengan Posyandu. Kader Posyandu yang telah terlatih sebanyak 414 kader, terdiri dari Tahun 2007 sebanyak 167 kader, tahun 2008 sebanyak 167 kader, tahun 2009 sebanyak 120 kader. Dari sejumlah kader tersebut memiliki sasaran 1.130 posyandu dengan sasaran kader sebanyak 9.040 kader.

2.4. PRASARANA DAN SARANA DAERAH

2.4.1. Perumahan

Kondisi rumah penduduk di Kabupaten Sukoharjo secara umum baik. Hal ini dapat dilihat dari mayoritas jenis rumah penduduk yang sudah permanen (tembok), yaitu sebesar 46,51%. Meskipun demikian, masih ada rumah yang dindingnya belum permanen, yang membutuhkan peningkatan kualitas rumah sehingga dapat menjadi tempat tinggal yang nyaman dan sehat serta dapat meningkatkan kualitas hidup penghuninya. Data mengenai jumlah dan jenis rumah yang ada di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dengan rata-rata tingkat hunian sebesar 5 orang/rumah.

Tabel 2.28

Banyaknya Rumah Penduduk di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009

No	Klasifikasi Rumah	Jumlah
1	Permanen	89.312
2	Semi Permanen	63.530
3	Non Permanen	39.171
	JUMLAH TOTAL	192.013

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sukoharjo

2.4.2. Pelayanan Fasilitas Pendidikan

Dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan di Kabupaten Sukoharjo baik sekolah negeri maupun swasta tercatat Taman Kanak-kanak sebanyak 338 buah, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 552 buah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 75 buah, Sekolah Menengah Umum/Kejuruan (SMU/K) 50 buah dan Perguruan Tinggi 5 buah.

Tabel 2.29**Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2009**

Jenjang Pend.	Jumlah Sekolah		Jumlah	
	Negeri	Swasta	Sekolah	Siswa
TK	3	335	338	9.682
SD	465	87	552	75.335
SMP	45	30	75	34.297
SMU	11	13	24	10.475
SMK	3	23	26	14.054
PT	2	3	5	38.928

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Sukoharjo

Dari Tabel tersebut di atas nampak bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan formal pada tiap tingkatan cukup tinggi.

Daya tampung SD, baik negeri maupun swasta mampu sebanyak 75.335 murid, SMP sebanyak 34.297 siswa, SMU/K sebanyak 24.539 siswa dan Perguruan Tinggi sebanyak 38.928 orang.

2.4.3. Pelayanan Fasilitas Kesehatan

Cakupan pelayanan kesehatan telah menjangkau ke seluruh wilayah, hal ini dapat dilihat dari jumlah fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Jumlah Rumah Sakit sebanyak 8 buah, Rumah Sakit Bersalin 25 buah, Puskesmas 12 buah.

Puskesmas sebagai ujung pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan jumlah 12 buah sehingga rata-rata tiap kecamatan dilayani oleh 1 buah, serta didukung oleh fasilitas kesehatan lainnya memberikan gambaran bahwa pelayanan fasilitas kesehatan masyarakat telah mencukupi.

Tabel 2.30**Perkembangan Sarana Kesehatan di Kabupaten Sukoharjo**

No	Jenis Fasilitas	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Puskesmas	21	21	21	21	12
2.	Puskesmas Pembantu	47	47	47	48	57
3.	RS Negeri	2	2	2	2	2
4.	RS Swasta	4	4	5	6	6
5.	Rumah Bersalin	30	32	26	26	25
6.	Balai Pengobatan Negeri dan swasta	18	22	32	23	36

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sukoharjo

2.4.4 Jaringan Transportasi

Panjang jaringan jalan di Kabupaten Sukoharjo adalah 670,64 km. Dari panjang jaringan jalan tersebut 13,84 km merupakan jalan nasional; 51,68 km merupakan jalan provinsi; dan 605,12 km merupakan jalan kabupaten. Bila dilihat dari kondisinya, 115,10 km berada dalam kondisi baik; 264,83 km berada dalam kondisi sedang; dan 254,71 km berada dalam kondisi rusak. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.31

Panjang Jalan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009

Status Jalan	Panjang (km)	Kondisi		
		Baik	Sedang	Rusak
Negara	13,84	13,84	-	-
Provinsi	51,68	21,23	20,61	9,84
Kota/Lokal	605,12	116,3	244,22	244,87
Jumlah	670,64	151,10	264,83	254,71

Sumber: Sukoharjo dalam Angka 2010

Selain jalan dan terminal sebagai sarana transportasi utama yang ada, Kabupaten Sukoharjo juga memiliki sarana simpul transportasi yang lain, yaitu stasiun. Stasiun di Kabupaten Sukoharjo ada dua, yang semuanya termasuk stasiun perhentian kereta api di Sukoharjo. Terminal angkutan umum, terdiri dari terminal Kartasura, dan Terminal Sukoharjo Kota.

Tabel 2.32

Banyaknya Kendaraan Bermotor dan Trayek Angkutan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009

Tahun	Jenis Kendaraan			
	Mobil Penumpang	Mobil Beban	Mobil Bus	Sepeda Motor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2006	11.096	6.421	1.064	206.526
2007	11.946	6.609	1.063	224.997
2008	13.131	6.804	639	217.110
2009	13.949	7.078	646	261.626

Sumber : Sukoharjo Dalam Angka 2010

2.4.5. Jaringan Air Bersih

Jumlah pelanggan air bersih (PDAM) di Kabupaten Sukoharjo adalah 12.693 pelanggan yang didominasi oleh pelanggan non niaga atau rumah tangga.

Meskipun demikian, pengguna rata-rata terbesar adalah industri, sosial umum dan instansi pemerintah. Data selengkapnya mengenai jumlah pelanggan air bersih PDAM di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 2.33
Banyaknya Pelanggan Air Bersih PDAM di Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2009

Jenis Pelanggan	Jumlah Pelanggan	Pemakaian Air (m ³)
Sosial umum	43	29.663
Sosial Khusus	132	53.025
Rumah Tangga	11.994	2.719.417
Instansi Pemerintah	101	55.204
Niaga Kecil	407	97.401
Niaga Besar/Industri	16	21.729
Jumlah	12.693	2.976.409

Sumber: Sukoharjo Dalam Angka 2010

Kebutuhan air bersih selain dari PDAM, juga kebutuhan air minum yang dikelola oleh masyarakat yang pengadaannya difasilitasi oleh PAMSIMAS.

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) adalah program nyata pemerintah pusat dan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan penyediaan air minum, sanitasi, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama dalam menurunkan angka diare dan penyakit lain yang ditularkan melalui air dan lingkungan.

Bahwa dalam rangka meningkatkan jumlah masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, perlu diadakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Kabupaten Sukoharjo;

Pada tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mulai mengikuti Program PAMSIMAS yang dananya berasal dari Bank Dunia dan Pemerintah Daerah Kabupaten (APBD Kabupaten).

Pelaksanaan Kegiatan Program PAMSIMAS adalah diawali dengan sosialisasi pada warga masyarakat yang hidupnya berada di daerah yang miskin akan air bersih. Kemudian berlanjut pada pembangunan fisik kepada Desa-desa yang menyatakan minat untuk mengikuti Program PAMSIMAS. Dengan adanya program PAMSIMAS di kabupaten Sukoharjo sangat membantu masyarakat

dalam penyediaan air bersih, sebelum adanya program PAMSIMAS masyarakat untuk mencari air bersih harus antri di sumber air yang ada. Adapun lokasi desa sasaran PAMSIMAS di Kabupaten Sukoharjo 56 Desa. Berikut jumlah data sasaran Program PAMSIMAS per kecamatan di Kabupaten Sukoharjo

Tabel 2.34
Jumlah Sasaran Desa/ Kelurahan Sasaran Program PAMSIMAS
Tahun 2009

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Desa/Kel Sasaran Pamsimas
1	Bulu	12	7
2	Weru	13	7
3	Tawang Sari	12	6
4	Sukoharjo	14	6
5	Nguter	16	4
6	Bendosari	14	7
7	Grogol	14	6
8	Polokarto	17	6
9	Mojolaban	15	4
10	Gatak	14	1
11	Baki	14	1
12	Kartasura	12	1
	JUMLAH	167	56

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Sukoharjo

Dari 192.013 unit rumah penduduk pada tahun 2009 rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Sukoharjo sebanyak 69% meningkat 2% dibandingkan tahun 2008. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa penduduk di Kabupaten Sukoharjo mempunyai kesadaran dalam rangka pewujudan kehidupan yang sehat.

2.4.6. Jaringan Drainase

Permasalahan drainase yang dihadapi di Kabupaten Sukoharjo adalah adanya banjir kiriman dari beberapa sungai dari Karanganyar yang bermuara ke wilayah aliran Bengawan Solo. Hal ini menyebabkan sering terjadi banjir lokal. Kondisi ini diperparah dengan kurang efektifnya sistem drainase di kawasan perkotaan dan kawasan hunian (Grogol, kawasan Sritek, Solobaru, Kartasura, Kawasan Kali Langsur dll).

2.4.7. Jaringan Sampah

Permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Sukoharjo semakin hari semakin kompleks dan perlu penanganan serius, mulai dari sumber sampah (rumah tangga, pasar, pusat perdagangan, industri dan lain lain) hingga tempat pembuangan akhir (TPA). Pengumpulan sampah dari sumber sampah sampai ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) dilakukan oleh masyarakat dan Dinas Pekerjaan Umum. Selanjutnya dari TPS ke TPA dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam pengelolaan persampahan diarahkan pada pengelolaan persampahan yang dapat dipergunakan untuk lintas wilayah, dengan didukung ketersediaan tempat pembuangan sementara (TPS), tempat pembuangan akhir (TPA) dan armada angkut serta sumber daya manusianya.

Pengembangan sistem prasarana pengelolaan persampahan di Kabupaten Sukoharjo, meliputi:

1. Kerja sama antar wilayah kecamatan dalam penanggulangan masalah sampah, terutama di wilayah perkotaan;
2. Penempatan tempat pemrosesan akhir (TPA) sesuai dengan persyaratan teknis dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
3. Pengembangan pengelolaan persampahan dengan teknologi ramah lingkungan.

Pelayanan persampahan di Kabupaten Sukoharjo termasuk dalam penanganan prioritas untuk segera ditangani, karena pelayanan ini termasuk pelayanan utama dari aspek penyediaan prasarana dan sarana dasar perkotaan. Pengelolaan persampahan ini terkait erat dengan luas dan jangkauan layanan, karakteristik manajemen persampahan, kondisi fisik Tempat Pembuangan Akhir (TPA), prasarana dan sarananya serta partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan persampahan yang ada.

Volume timbulan sampah di Kabupaten Sukoharjo dengan jumlah penduduk 693.343 jiwa pada tahun 2006 diperkirakan sebesar 198 m³/hari atau 72.270 m³/tahun.

Saat ini hanya 5 (lima) kecamatan pada kawasan perkotaannya yang terlayani armada angkutan sampah dengan volume sampah terangkut hanya 16,81%. Sedangkan untuk kawasan perdesaan jumlah sampah yang dihasilkan

relatif sedikit bila dibandingkan dengan lahan yang ada, dan jenis sampahnya terdiri dari bahan organik yang mudah dihancurkan secara alami oleh alam sehingga masyarakat perdesaan dalam membuang sampah dilakukan di pekarangannya sendiri-sendiri.

Banyaknya timbulan sampah di Kabupaten Sukoharjo sebagian besar dihasilkan dari warga masyarakat yang tinggal di perkotaan, seperti di Kecamatan Sukoharjo, Grogol, Kartasura.

Prasarana dan sarana persampahan di Kabupaten Sukoharjo masih terbatas sehingga pelayanan persampahan belum mampu mengangkut semua timbulan sampah ke TPA.

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah di Desa Mojorejo Kecamatan Bendosari adalah satu-satunya TPA yang melayani persampahan di Kabupaten Sukoharjo. Pada TPA ini menggunakan sistem pengolahan kontrol landfill dimana sampah dibuang/ ditimbun dan dilakukan penutupan dengan tanah secara berkala 4 s/d 5 hari sekali. Sistem ini lebih baik dari pada sistem *open dumping* sebab sistem *open dumping* dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, tempat berkembangnya vektor penyakit seperti lalat dan tikus, menimbulkan bau, pencemaran terhadap air permukaan maupun air tanah dan rawan terhadap bahaya kebakaran, namun demikian TPA Mojorejo ini perlu dilakukan penataan dan pembenahan menuju *sanitary landfill* yaitu dilakukan penutupan tanah setiap hari.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2007 telah melakukan studi Optimalisasi Fungsi TPA Mojorejo dan Studi Kelayakan TPA Mojorejo, yang salah satu rekomendasinya adalah perluasan TPA Sampah baru dengan sistem pengolahan *sanitary landfill* dan meningkatkan/memperbaiki manajemen/pengelolaan persampahan.

Pengelolaan sampah Kabupaten Sukoharjo saat ini baru menjangkau 23 Kelurahan/Desa dari 167 Kelurahan/desa yang ada di Kabupaten Sukoharjo dan sampah yang terangkut baru 83% dari seluruh produksi sampah total Kabupaten Sukoharjo sebesar $\pm 170 \text{ m}^3/\text{hari}$.

Jumlah sarana prasarana persampahan yang ada, secara rinci dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.35

Jumlah sarana dan prasarana Persampahan

Sarana dan Prasarana Persampahan	Jumlah
- Truck Hidrolik/Arm Roll	2 unit
- Dump Truck Sampah	10 unit
- Creane	- unit
- Bull Dozer	1 unit
- Shovel Loader	- unit
- Excavator / Back Hoe	1 unit
- Kontainer Sampah	16 unit

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo

2.4.8. Jaringan Listrik

Jumlah pelanggan listrik PLN pada tahun 2009 tercatat sebanyak 166.914 pelanggan, yang didominasi oleh pelanggan rumah tangga, sebanyak 156.217 pelanggan dengan total pemakaian adalah 14.815.600 Kwh. Bila dilihat secara rinci, maka pemakai dengan konsumsi listrik terbesar adalah sektor industri, yaitu sejumlah 34.136.738 Kwh, sedangkan pemakai dengan konsumsi rata-rata terendah adalah sektor hotel, dengan konsumsi sebesar 62.332 Kwh. Data mengenai jumlah pelanggan listrik PLN dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.36

Banyaknya Pelanggan Listrik PLN di Kabupaten Sukoharjo

Jenis Pemakaian	Langganan	Penggunaan (Kwh)
Rumah Tangga	156.217	14.815.600
Usaha/Toko	6.277	3.401.219
Hotel	14	62.332
Industri	274	34.136.738
Kantor	437	225.130
Sosial	3.311	666.550
Penerangan Jalan	384	866.066
JUMLAH	166.914	54.173.635

Sumber: Sukoharjo Dalam Angka 2010

Jangkauan pelayanan listrik sudah menjangkau pada seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo namun belum semua bangunan rumah tangga menjadi pelanggan listrik PLN, hal ini dapat dilihat dari jumlah bangunan rumah tangga

sebanyak 192.013 buah, sedangkan yang menjadi pelanggan rumah tangga sejumlah 156.217 pelanggan.

2.5. PEMERINTAHAN UMUM

2.5.1. Organisasi dan aparatur Pemerintahan

Secara administratif, Kabupaten Sukoharjo terbagi atas 12 wilayah Kecamatan dan 150 desa dan 17 Kelurahan. Dalam melaksanakan tugasnya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo didukung oleh aparatur sebanyak 9.544 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Adapun struktur pegawai menurut Golongan secara rinci adalah sebagai berikut :

Tabel 2.37

Data Pegawai (PNS) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006-2010

DATA KEPEGAWAIAN	Tahun				
	2006	2007	2008	2009	2010
1. Data Jumlah Pegawai					
- Golongan IV/a – IV/d	3.321	3.677	3.735	4.210	4.254
- Golongan III/a – III/d	5.151	4.913	4.951	3.831	3.792
- Golongan II/a – II/d	1.285	1.691	1.946	1.209	1.375
- Golongan I/a – I/d	67	147	195	106	123

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Sukoharjo

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya unit kerja pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo didukung oleh unsur staf yang memiliki kualifikasi SDM yang relatif memadai.

Tabel 2.38

Jumlah Pegawai Menurut Pendidikannya di Kabupaten Sukoharjo

Tahun 2006-2009

No.	Tingkat Pendidikan	JUMLAH / TAHUN				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	SD	143	149	151	149	149
2	SLTP	398	392	385	366	366
3	SLTA	3.152	2.909	2.912	2.633	2.633
4	Diploma (D1,D2 danD3)	2.606	2.758	2.731	2.633	2.633
5	S1	3.466	3.989	4.260	4.588	4.588
6	S2	186	195	288	357	357
7	S3	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo

Dalam usaha meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, telah diberikan kesempatan yang luas kepada para pegawai untuk meningkatkan profesionalisme melalui pendidikan formal maupun pendidikan nonformal serta pelatihan-pelatihan. Sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.39
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Struktural di Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2006-2009

DIKLAT	TAHUN			
	2006	2007	2008	2009
1. Diklat Pim II	2	4	1	-
2. Diklat Pim III	15	9	9	6
3. Diklat Pim IV	20	24	25	-

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Sukoharjo

Berbagai macam jenis pendidikan dan latihan teknis maupun fungsional terus dilaksanakan dalam upaya meningkatkan ketrampilan teknis jabatan-jabatan tertentu. Belum banyak jenis pendidikan dan latihan teknis maupun fungsional yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Hal tersebut dikarenakan masih terbatasnya anggaran yang dimiliki. Selengkapnya jenis dan jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.40
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Fungsional di Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2006-2009

DIKLAT	TAHUN			
	2006	2007	2008	2009
1. Diklat Fungsional Guru SD	35	40	40	40
2. Diklat Fungsional Guru SLTP	35	40	40	40
3. Diklat Fungsional Guru SLTA	35	40	40	40
4. Diklat Teknis Fungsional	121	59	47	-
5. Diklat Kepala Sekolah dan Diklat Penyusunan Karya Ilmiah	175	195	195	195
6. Diklat Pra Jabatan Gol. II	144	283	240	480
7. Diklat Pra Jabatan Gol. III	131	202	80	160

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Sukoharjo

2.5.2 Pelayanan Publik

Seiring dengan bergulirnya arus reformasi yang ditandai dengan semakin banyaknya berbagai tuntutan masyarakat, maka sistem penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Tuntutan masyarakat tersebut mencakup kualitas kinerja instansi pemerintahan yang di dalamnya termasuk aspek pertanggungjawaban (akuntabilitas) pelaksanaan tugas para pejabat pemerintah, baik secara administratif dan manajerial maupun yuridis formal. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat akan mampu meningkatkan citra/wibawa aparatur yang pada akhirnya akan mewujudkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Di samping aspek tersebut di atas, peningkatan kualitas pelayanan juga menjadi “*entry point*” yang sangat strategis dalam mengantisipasi pelaksanaan era globalisasi dalam berbagai sektor khususnya sektor perekonomian yang merupakan penggerak utama guna mewujudkan visi kabupaten, peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dari administrasi pemerintahan menjadi sangat penting. Di dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan mencakup berbagai jenis pelayanan yang diberikan, diantaranya adalah kegiatan pencatatan, pelayanan surat–menyurat penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi maupun kegiatan tata usaha lainnya. Kegiatan pelayanan administrasi pemerintahan menghasilkan beberapa produk akhir yang berupa dokumen, seperti sertifikasi, perizinan, rekomendasi, keterangan tertulis dan lain-lain. Produk administrasi pemerintahan diantaranya adalah Pelayanan Sertifikat Tanah, Pelayanan, SIUP, TDP, IMB, HO, Pelayanan Administrasi Kependudukan (KTP, Nikah Talak Cerai Rujuk (NTPCR), Akte Kelahiran/Kematian), Pelayanan usaha perdagangan, pariwisata, kesehatan, dan lain - lain.

Tabel 2.41

**Jumlah Akte/Ijin yang Dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2005-2009**

No	Jenis Layanan	2005	2006	2007	2008	2009
1	Akte Kelahiran	15.889	19.116	20.815	20.045	27.083
2	Akte Kematian	59	42	53	39	74
3	Perkawinan	249	229	278	264	224
4	Perceraian	17	10	23	22	25
5	Pengakuan Anak	9	10	11	3	4
6	KTP	159.854	128.834	183.567	188.265	179.296
7	IMB	-	-	599	1.110	937
8	HO	-	-	163	459	465
9	SIUP/TDP	-	-	266/322	742/828	730/807

Sumber : Sukoharjo dalam Angka 2010

Upaya peningkatan pelayanan masyarakat dilakukan melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Penerapan SPM ini pada dasarnya adalah upaya untuk memberikan jaminan/kepastian dari pelayanan administrasi pemerintahan kepada penerima pelayanan yang meliputi standar mekanisme pelayanan, standar biaya, standar waktu penyelesaian, baik proses permintaan/pengajuan atau pengusulan maupun proses pengaduan, standar produk pelayanan, standar sarana dan prasarana yang harus disediakan dalam pelayanan umum, standar kompetensi petugas pemberian pelayanan.

Menindaklanjuti penerapan SPM di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah diadakan evaluasi melalui penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sehingga perlu dibentuk Pusat Pengaduan Penanganan Pelayanan Publik (P5). P5 ini merupakan wadah/saluran bagi masyarakat untuk mengadu/komplain, apabila masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang kurang memuaskan

Berdasarkan hal tersebut, kebijakan pembangunan selama lima tahun kedepan diarahkan pada upaya memantapkan pelaksanaan otonomi daerah. Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui peningkatan kinerja pelayanan prima diberbagai sektor publik didukung perangkat daerah yang efektif dan efisien, aparatur yang profesional dan berkarakter, infrastruktur yang memadai dan kemandirian keuangan daerah dalam suasana politik, hukum dan kamtibmas yang kondusif.

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Gambaran pengelolaan keuangan daerah menjelaskan tentang aspek kebijakan keuangan daerah, yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta capaian kinerja, guna mewujudkan visi dan misi.

3.1. ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Kapasitas keuangan Daerah akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat. Kemampuan pemerintah dapat diukur penerimaan pendapatan daerah, penerimaan pendapatan daerah dari tahun ke tahun senantiasa menunjukkan peningkatan, namun demikian kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penerimaan masih relatif kecil dibanding dengan sumber penerimaan dari dana perimbangan.

Kondisi tersebut merupakan tantangan sekaligus peluang, yang perlu disikapi dengan usaha keras, agar komposisi perimbangan peran PAD dan pendapatan dari pusat mencapai titik keseimbangan (*equilibrium*).

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah diarahkan untuk mengoptimisasi sumber-sumber pendapatan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, optimalisasi aset dan kekayaan pemerintah Daerah termasuk mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru dengan menganut prinsip (1) Potensial artinya lebih menitik beratkan pada potensinya dari pada jumlah atau jenis pungutan yang banyak. (2) Tidak memberatkan masyarakat, (3) Tidak merusak lingkungan (4) Mudah diterapkan/diaplikasikan, mudah dilaksanakan, (5) Penyesuaian pendapatan baik mengenai tarip dan materinya.

Di bawah ini digambarkan penerimaan pendapatan Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2007 s/d 2009.

Tabel 3.1
Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2006-2010

NO	URAIAN	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
A	BAG. PENDAPATAN ASLI DAERAH					
a.	Pos Pajak Daerah	13.555.956.368,00	14.532.729.316,00	15.421.729.385,00	18.003.312.543,00	21.688.463.781,00
b.	Pos Retribusi Daerah	12.923.748.623,00	12.317.484.186,00	13.760.435.850,00	20.143.185.840,00	31.339.132.636,00
c.	Pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.665.850.283,00	2.140.161.365,00	2.822.801.706,00	3.734.266.687,00	4.378.390.186,00
	Lain-lain PAD yang sah	14.862.525.449,00	10.729.060.497,69	9.780.094.495,69	6.961.763.270,00	7.861.077.801,00
	JUMLAH	44.008.080.723,00	39.719.435.364,69	41.785.061.436,69	48.842.528.340,00	65.267.064.404,00
B	BAG. DANA PERIMBANGAN					
a.	Pos Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	31.537.109.068,00	35.458.997.851,00	38.886.913.735,00	43.301.742.011,00	54.082.821.912,00
b.	Pos Dana Alokasi Umum	421.438.000.000,00	460.662.000.000,00	498.935.688.000,00	524.980.151.000,00	516.588.118.000,00
c.	Pos Dana Alokasi Khusus	22.849.000.000,00	42.445.000.000,00	50.547.000.000,00	63.107.000.000,00	49.452.900.000,00
d.	Transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi			44.314.560.510,00		
	JUMLAH	475.824.109.068,00	538.565.997.851,00	588.369.601.735,00	631.388.893.011,00	620.123.839.912,00
C	BAG. LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
a.	Pos Lain - lain Pendapatan Daerah yang sah	29.438.975.972,00	37.483.682.671,00	13.146.550.250,00	52.720.314.942,00	113.041.710.888,00
	JUMLAH	29.438.975.972,00	37.483.682.671,00	13.146.550.250,00	52.720.314.942,00	113.041.710.888,00
	JUMLAH PENERIMAAN KEUANGAN					
		549.271.165.763,00	615.769.115.886,69	643.301.213.421,69	732.951.736.293,00	798.432.615.204,00

Sumber : DPPKAD Kab. Sukoharjo

Tabel di atas menunjukkan bahwa proporsi pendapatan daerah masih didominasi oleh sumber-sumber pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan baik pos bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal ini menunjukkan bahwa ratio kemandirian keuangan daerah masih rendah atau rata-rata baru mencapai sekitar 8%. Oleh karena itu upaya menggali perolehan pendapatan harus dilakukan secara sistematis dan terarah dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki seoptimal mungkin melalui riset potensi daerah.

Dengan mempertimbangkan angka rata-rata pertumbuhan pendapatan maka proyeksi penerimaan daerah pada tahun 2011 s/d 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah tahun 2011 -2015

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
PAD	71.051.620.000,00	78.156.782.000,00	122.000.000.000,00	128.100.000.000,00	134.505.000.000,00
DANA PERIMBANGAN	658.553.658.000,00	658.553.658.000,00	658.553.658.000,00	658.553.658.000,00	658.553.658.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	150.853.319.000,00	150.853.319.000,00	150.853.319.000,00	150.853.319.000,00	150.853.319.000,00
JUMLAH	880.458.597.000,00	887.563.759.000,00	931.406.977.000,00	937.506.977.000,00	943.911.977.000,00

Sumber : DPPKAD Kab. Sukoharjo

3.2. ARAH PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Pengelolaan belanja daerah sangat erat kaitannya dengan sistem manajemen keuangan daerah, sistem penganggaran maupun sistem akuntansi. Seiring dengan dilaksanakannya reformasi dibidang keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik (*Public Accountability*) dengan mendasarkan pada prinsip *value for money*. Disamping itu, pengelolaan belanja daerah harus berlandaskan anggaran Kinerja (*Performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya kepentingan publik terutama masyarakat miskin dan kurang beruntung, dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*) melalui pendekatan kinerja (*performance oriented*). Disamping itu, pengeluaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait, mendasarkan pada, standar analisa belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan. Identifikasi belanja pengeluaran akan dibedakan menurut belanja langsung dan tidak langsung guna meningkatkan aspek transparansi. Kriteria tersebut bertitik tolak dari kegiatan yang dilakukan.

Tabel 3.3
Rekapitulasi Belanja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 – 2010

No	BELANJA DAERAH	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
1	2	3	4	5	6
II.	BELANJA DAERAH, terdiri :	635.875.555.216,00	634.302.936.229,00	710.827.126.324,00	782.102.665.512,00
1.	Belanja Tidak Langsung	382.363.927.454,00	380.917.855.709,00	536.544.439.434,00	572.354.098.503,00
a	Belanja Pegawai	304.494.899.447,00	304.051.613.702,00	431.960.259.998,00	502.505.417.437,00
b	Belanja Bunga	105.208.007,00	105.208.007,00	79.960.888,00	68.934.925,00
c	Belanja Subsidi	0	0	0	0
d	Belanja Hibah	0	0	41.329.056.000,00	10.842.745.251,00
e	Belanja Bantuan Sosial	17.216.664.000,00	17.216.664.000,00	27.955.403.048,00	22.977.103.050,00
f	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa	1.057.933.000,00	1.057.933.000,00	1.025.854.000,00	1.057.830.000,00
g	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	57.491.623.000,00	57.491.623.000,00	33.947.170.000,00	34.840.567.840,00
h	Belanja Tidak Terduga	1.997.600.000,00	994.814.000,00	246.735.500,00	61.500.000,00
2.	Belanja Langsung	253.511.627.762,00	253.385.080.520,00	174.282.686.890,00	209.748.567.009,00
a	Belanja Pegawai	39.500.180.444,00	39.777.285.704,00	34.936.948.340,00	45.626.985.267,00
b	Belanja Barang dan Jasa	90.829.196.661,00	90.520.500.707,00	84.623.575.118,00	101.993.517.862,00
c	Belanja Modal	123.182.250.657,00	123.087.294.109,00	54.722.163.432,00	62.128.063.880,00
	Jumlah Belanja	635.875.555.216,00	634.302.936.229,00	710.827.126.324,00	782.102.665.512,00

Sumber : DPPKAD Kabupaten Sukoharjo

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa anggaran belanja aparatur masih mendominasi belanja pemerintah dibandingkan anggaran pelayanan publik.

Dalam hal kepentingan tertentu, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah dapat pula membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran.

Adapun proyeksi belanja daerah pada tahun 2011 s/d 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2011 - 2015

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
JUMLAH	949.538.700.000,00	954.867.080.000,00	981.357.700.000,00	984.538.700.000,00	984.538.700.000,00

Sumber : DPPKAD Kabupaten Sukoharjo

Mencermati besarnya belanja yang harus dikeluarkan pada lima tahun mendatang diperlukan upaya secara serius untuk mengelola belanja daerah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan.

3.3. PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan daerah dan Belanja Daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil Penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan Pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana Cadangan.

Melihat prediksi lima tahun kedepan, menunjukkan bahwa prosentase Kenaikan belanja lebih besar dari pada kenaikan pendapatan. Oleh karena itu dalam upaya membiayai kegiatan Pemerintahan diperlukan langkah-langkah pembiayaan baik dengan sisa lebih, hutang dan sebagainya.

3.4. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Arah kebijakan ekonomi daerah yang tangguh, sehat dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap peningkatan kegiatan ekonomi akan berpengaruh pada peningkatan lapangan kerja & kesempatan berusaha yang pada akhirnya akan mewujudkan kemakmuran & kesejahteraan masyarakat. Maksudnya bahwa setiap potensi ekonomi yg dimiliki harus dimanfaatkan secara optimal dengan memperhatikan peluang-peluang yang ada guna kepentingan & kesejahteraan masyarakat. Namun demikian melihat prediksi lima tahun ke depan, ternyata prosentasi kenaikan belanja lebih besar dari pada kenaikan pendapatan. Oleh karena itu beberapa langkah harus dilakukan dalam upaya membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, maka pembiayaan pembangunan dapat didanai dengan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan melakukan pinjaman daerah. Kemampuan Kabupaten Sukoharjo dalam melakukan pinjaman daerah dapat dilihat dari DSCR yang ada. Selengkapny kemampuan pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk melakukan pinjaman dapat dilihat dalam tabel 3.5.

Tabel 3.5.
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007-2010

URAIAN	TAHUN			
	2007	2008	2009	2010
Pendapatan Asli Daerah	39.719.435.364,69	41.785.061.436,69	48.842.528.340,00	65.345.251.712,00
Bagian Daerah	35.458.997.851,00	38.886.913.735,00	43.301.742.011,00	54.082.821.912,00
Dana Alokasi Umum	460.662.000.000,00	498.935.688.000,00	524.980.151.000,00	516.588.118.000,00
Belanja DPRD	6.148.857.727	6.139.081.640,00	5.412.367.572,00	4.952.308.788,00
Belanja Pegawai	367.742.106.108	430.857.026.602,00	426.547.892.426,00	543.180.093.916,00
Angsuran Pokok Pinjaman	3.590.096.863,00	2.147.190.728,00	2.592.552.532,00	2.592.552.532,00
Bunga Pinjaman	105.208.007,00	94.476.571,00	79.960.888,00	68.934.925,00
Biaya lainnya (Komitmen, Jasa bank dll)	2.170.485,41	1.941.032,26	1.701.295,49	1.537.400,38
DSCR	43,80	63,56	69,24	33,01

Sumber : DPPKAD Kabupaten Sukoharjo

Namun demikian, kebijakan pembiayaan pembangunan melalui hutang harus memenuhi syarat yaitu hutang tersebut dipergunakan untuk investasi dan/atau mempunyai dampak yang luas terhadap kepentingan masyarakat.

Disamping itu, lima tahun mendatang kebijakan umum anggaran diarahkan untuk memantapkan landasan ekonomi daerah guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maju, dan bermartabat didukung pemerintahan yang profesional melalui:

- a. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk pemantapan kehidupan beragama, pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak dengan memprioritaskan pada golongan masyarakat miskin.
- b. Mendorong pertumbuhan ekonomi secara adil dan merata dengan prioritas pada bidang pertanian, industri dan perdagangan sebagai tulang punggung perekonomian daerah dengan memacu wilayah pengembangan.
- c. Meminimalisasikan gejolak fluktuasi ekonomi dengan memberikan bantuan dan proteksi kepada masyarakat miskin agar tetap mampu mencukupi kebutuhan dasar minimumnya.
- d. Mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kesempatan berusaha, optimalisasi potensi ekonomi lokal, pertanian, pemberdayaan

- usaha sektor informal, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta keadilan kesempatan untuk berusaha dalam iklim yang kondusif.
- e. Meningkatkan iklim investasi guna mendorong agar dapat mengurangi hambatan-hambatan baik yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, permodalan, infrastruktur, kelembagaan serta kepastian dan keamanan berinvestasi.
 - f. Mengoptimalkan pendapatan melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi sumber-sumber pendapatan tanpa membebani masyarakat.
 - g. Mengoptimalkan pengelolaan Asset dan kekayaan daerah agar dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah, melalui profesionalisme manajemen.
 - h. Menumbuhkembangkan iklim yang sehat di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sehingga mampu memberikan kontribusi optimal bagi pendapatan daerah termasuk mendirikan BUMD dan/atau perusahaan milik Pemerintah Daerah yang *profitable*.
 - i. Mengembangkan iklim kondusif bagi peningkatan swadaya melalui pola/skema kemitraan baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat, pemerintah daerah dengan swasta atau masyarakat dengan swasta. Struktur ekonomi daerah diarahkan untuk mewujudkan struktur perekonomian daerah yang kokoh dimana perdagangan dan jasa menjadi basis aktivitas perekonomian yang didukung oleh aktivitas perekonomian lainnya.
 - j. Setiap pengeluaran daerah harus didasarkan pada, standar analisa belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal serta memperhatikan prinsip efisien dan efektif.

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025. Oleh karena itu isu-isu strategis pada RPJMD Tahun 2010-2015 berkaitan erat dengan isu-isu RPJP Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025. RPJMD Tahun 2010-2015 merupakan Tahapan Pelengkapan Instrumen Inovasi yang pada tahapan ini memuat isu-isu strategis sebagai berikut:

4.1 Bidang Ekonomi

4.1.1 Pertanian

Tantangan dalam bidang pertanian pada tahun 2010-2015 adalah alih fungsi lahan. Rata-rata lahan sawah yang mengalami alih fungsi pertanian meningkat. Jika kecepatan alih fungsi lahan sawah ini berlangsung secara terus menerus, maka pada tahun 2010-2015 akan terjadi pengurangan lahan sawah yang signifikan. Hal ini menjadi ancaman yang mendasar terhadap turunnya produksi beras dan kecukupan pangan di Sukoharjo.

Selain penyusutan luas sawah, tantangan lainnya adalah tersedianya air irigasi yang diprediksi akan mengalami penurunan dalam lima tahun ke depan, karena terjadi persaingan penggunaan air untuk keperluan pertanian dan non-pertanian. Indeks Penggunaan Air (IPA) yaitu rasio persediaan air dan penggunaannya di Sukoharjo perlu diantisipasi supaya tidak mencapai kondisi kritis. Bila persediaan air irigasi untuk sawah berkurang, maka luas tanam dan luas panen untuk padi sawah akan mengalami penurunan yang berimplikasi terhadap penurunan produksi beras. Anomali iklim mempengaruhi produktivitas dan kecukupan pangan di Kabupaten Sukoharjo. Hal itu dapat dilihat sering terjadinya banjir dan cuaca ekstrem yang berakibat terganggunya siklus tanam.

Disamping itu, serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) khususnya Wereng Batang Coklat (WBC) perlu diwaspadai. Untuk itu perlu kerja keras dan komitmen besar antara Pemerintah, Dinas Pertanian, Penyuluh, Pengamat OPT dan petani untuk mengurangi dampak dari serangan hama penyakit tanaman dengan a) tanam serempak (untuk memutus siklus hama), b) budidaya tanaman sehat, c) pengaturan pola tanam (padi-padi-palawija/padi-padi-bero), d) pengendalian hama penyakit melalui gerakan bersama secara rutin dan berkesinambungan, e) pupuk berimbang, f) gilir varietas, g) pengairan berselang, h) pengamatan OPT sejak dini, dan i) peningkatan sumberdaya penyuluh pertanian.

4.1.2 Ketahanan Pangan

Pembangunan ketahanan pangan nasional dalam RPJPN 2005 – 2025, Pemerintah bertumpu pada kemandirian pangan yang diartikan sebagai kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan yang cukup, mutu yang layak, aman dan halal yang didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumberdaya lokal.

Sehubungan dengan upaya pencapaian kemandirian pangan, maka tantangan bidang ketahanan pangan antara lain adalah kemampuan dalam menyediakan pangan yang cukup bagi masyarakat. Keterbatasan akses pangan (terutama beras) antara lain disebabkan oleh kurangnya alternatif lain makanan pokok pengganti bera dan kurangnya pengembangan jenis-jenis bahan makanan pokok baru serta kualitas pangan masyarakat yang masih belum beragam, bergizi, seimbang dan aman. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) secara nasional pada tahun 2015 diharapkan tercapai sebesar 95,0 (realisasi tahun 2008 secara nasional sebesar 81,9). Sedangkan skor PPH di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2009 sebesar 80,1; tahun 2010 sebesar 83,8 dan target di tahun 2011 sebesar 85,8.

Tingkat konsumsi umbi-umbian atau pangan non beras oleh masyarakat Sukoharjo dan Indonesia pada umumnya masih relatif kecil yaitu sekitar 8 kg/kapita/tahun. Meskipun umbi-umbian sangat mudah diproduksi di Sukoharjo dengan produktivitas dan luas lahan yang relatif cukup tetapi belum dimaksimalkan konsumsinya. Dengan kenyataan tersebut maka di Bidang Ketahanan Pangan perlu mengembangkan dan melaksanakan program penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, dalam rangka pencapaian peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH) sehingga tidak hanya tergantung pada beras.

Dalam rangka mencapai skor PPH yang ditargetkan di tahun 2015, maka Pemerintah telah menerbitkan Perpres No. 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumberdaya Lokal dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.

4.1.3 UMKM-Koperasi

Koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional harus mampu berperan sebagai penopang utama sistem perekonomian daerah. Dengan demikian koperasi di Kabupaten Sukoharjo harus mampu memberikan kontribusi yang berarti terhadap produksi daerah, membuka lapangan kerja, memegang peran strategis dalam kegiatan perekonomian dalam rangka

mewujudkan ketahanan ekonomi daerah. Jumlah Koperasi di Sukoharjo yang sudah berbadan hukum sebanyak 596 unit, yang terdiri dari koperasi yang aktif sebanyak 455 unit dan yang tidak aktif sebanyak 141 unit. Pengembangan UMKM-Koperasi dihadapkan pada masalah internal maupun eksternal, untuk masalah internal yaitu; rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia, kemampuan UMKM-Koperasi dalam memanfaatkan Teknologi Informasi, jaringan kerjasama antar KSP/USP koperasi masih terbatas dan kebutuhan tenaga kerja belum optimal, rendahnya kualitas dan produktifitas UMKM-Koperasi.

Peluang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)-Koperasi adalah adanya kebijakan kredit tanpa agunan yang dapat meningkatkan kegiatan dibidang usaha kecil menengah dan koperasi. Sedangkan tantangan yang muncul dalam mengembangkan UMKM-Koperasi adalah adanya masalah eksternal antara lain; belum optimalnya pemberdayaan kerjasama antara instansi pemerintah dan dunia usaha serta kemitraan usaha antara UMKM-Koperasi dengan BUMN/BUMD dan perusahaan besar.

Peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan Koperasi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditumbuhkembangkan. Hal tersebut disebabkan kurangnya efektifitas fungsi dan peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan serta rentannya UMKM terhadap perubahan harga bahan bakar. Masih tingginya kredit konsumsi dibandingkan dengan kredit investasi juga menghambat kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga kurang menopang aktivitas sektor riil. Selain itu, dibutuhkan pengembangan UMKM dan koperasi yang mampu mengembangkan agroindustri dan bisnis pariwisata guna menunjang daya beli dan ketahanan pangan.

4.1.4. Transportasi

Prasarana Transportasi adalah salah satu prasarana yang sangat penting dan vital untuk mobilitas penduduk dan memperlancar arus lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Pemenuhan transportasi dibagi 2 (dua), yaitu transportasi dalam kota dan antar kota. Untuk transportasi dalam kota selain kendaraan pribadi, tersedia juga angkutan umum bermotor antara lain, seperti bus, minibus, dan ojek (roda dua); serta angkutan tak bermotor (becak dan dokar). Dari keseluruhan aspek pelayanan transportasi di Kabupaten Sukoharjo, hampir seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Sukoharjo telah terjangkau pelayanan angkutan umum roda 4 (empat). Sedang pada kawasan perdesaan yang jauh dari jaringan angkutan umum masih dilayani oleh ojek atau kendaraan

roda 2 (dua). Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan transportasi adalah belum terbentuknya sistem jaringan dan model transportasi yang efisien, dimana masih terjadinya percampuran pelayanan transportasi regional dengan pelayanan transportasi kota serta belum adanya pelayanan angkutan umum yang menghubungkan antara pusat-pusat pelayanan fasilitas transportasi yang mendukung bagi pengembangan perekonomian daerah.

Kondisi jalan Kabupaten Sukoharjo secara umum masih kurang memadai. Kabupaten Sukoharjo memiliki jalan kabupaten sepanjang 605,12 km dengan kondisi baik sepanjang 396,10 km, jalan dalam kondisi sedang sepanjang 95,20 km, dan jalan dalam kondisi rusak sepanjang 113,82 km. Untuk jalan poros desa di Kabupaten Sukoharjo sepanjang 558,26 km secara prioritas perlu mendapat bantuan sepanjang 111,65 km.

4.1.5. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan partisipasi dan peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan. Dengan kata lain bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung terwujudnya kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pembangunan. Tantangan lain adalah bagaimana meningkatkan frekuensi keterlibatan masyarakat dalam penetapan kebijakan. Mewujudkan Desa Membangun juga merupakan isu yang perlu dicermati. Sasaran yang diharapkan dapat diwujudkan dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah; (a) Meningkatnya Kinerja pemerintahan desa; (b) Meningkatnya kualitas sarana prasarana desa; (c) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa.

4.2. Bidang Sosial Budaya

Pembangunan bidang sosial budaya berkaitan dengan kualitas manusia dan masyarakat Sukoharjo. Kondisi tersebut tercermin pada kuantitas dan kualitas penduduk seperti pendidikan, kesehatan, Pemberdayaan perempuan, pemuda, olah raga, seni budaya, keagamaan dan sebagainya.

Upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk, baik alami maupun migrasi masuk, dilakukan secara terus menerus. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Sukoharjo yang masih tinggi. Pembangunan kualitas hidup penduduk Sukoharjo tetap menjadi prioritas pembangunan daerah. Perkembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Sukoharjo menunjukkan perkembangan yang semakin membaik. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan pencapaian Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). IPM dihitung berdasarkan 3 (tiga) indikator yaitu Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Indeks Daya Beli. Ketiga indikator ini secara timbal balik dapat mengindikasikan kondisi kesejahteraan masyarakat atau pun kondisi kemiskinan masyarakat.

4.2.1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi yang multidimensi. Pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan dengan strategi tunggal. Secara nasional, mulai tahun 2008 Upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui program penanggulangan kemiskinan yang dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kluster antara lain : (1) Bantuan dan perlindungan sosial dengan instrumennya antara lain Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan lain-lain; (2) Pemberdayaan masyarakat dengan instrumennya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, antara lain PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP); (3) Penguatan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) dengan instrumennya Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah Kabupaten Sukoharjo akan mengakomodasi strategi penanggulangan kemiskinan tersebut dalam perencanaan pembangunan daerah serta menyediakan santunan sosial (uang duka) bagi penduduk miskin.

Disamping itu akan diberikan bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari rumah tangga miskin, bantuan kepemilikan dokumen kependudukan bagi rumah tangga miskin, bantuan kelompok usaha bersama bagi rumah tangga miskin, bantuan ternak, jaminan kesehatan daerah (jamkesda) dan sebagainya dalam rangka mendukung program nasional dengan menurunkan angka kemiskinan sampai dengan 2% pertahun.

Untuk mengefektifkan upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan kabupaten/kota. Tantangan yang dihadapi adalah mengkoordinasikan berbagai aspek meliputi: (i) Aspek Pendataan, (ii) Aspek Program, (iii) Aspek Pendanaan, dan (iv) Aspek Kelembagaan. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam upaya penanggulangan kemiskinan antara lain kurang validnya data rumah tangga miskin sebagai sasaran program

dan belum sinkronnya berbagai program penanggulangan kemiskinan lintas sektor.

4.2.2. Pendidikan

Pencapaian indeks pendidikan merupakan gabungan dari Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Pembangunan bidang pendidikan perlu diprioritaskan pada upaya akselerasi penuntasan program Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun melalui pendidikan formal maupun nonformal, serta rintisan Wajib Belajar 12 tahun. Tantangan yang dihadapi di bidang pendidikan adalah bagaimana meningkatkan APM/APK SMA untuk memperkecil kesenjangan yang terjadi antara APM/APK SMP dan SMA. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan menumbuhkan kesadaran diri untuk terus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dengan memberikan kesempatan yang luas untuk dapat mengakses pelayanan pendidikan menengah disertai dengan sistem pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi daerah.

Sebagaimana menjadi program pendidikan nasional, pengembangan pendidikan kejuruan perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini terkait dengan kebutuhan tenaga kerja terampil untuk menyongsong era pasar bebas.

Aspek peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, menjadi perhatian dalam meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan, termasuk penyerapan lulusannya di dunia kerja. Seiring dengan hal tersebut perlu upaya mengedepankan sekolah kejuruan dengan fokus pembelajaran pada pendidikan vokasional (*life skill*) yang mengutamakan kompetensi daerah.

4.2.3. Ketenagakerjaan

Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka akibat rendahnya tingkat pendidikan/ketrampilan/keahlian calon tenaga kerja menjadikan sebuah tantangan untuk mengupayakan bagaimana angka pengangguran tersebut dapat diturunkan. Salah satunya adalah dengan cara memperluas kesempatan kerja dan berusaha. Penyediaan tenaga terampil menjadi isu yang perlu ditangani sesuai tuntutan kebutuhan global, sehingga dapat meningkatkan nilai jual tenaga kerja. Dengan demikian diharapkan Kabupaten Sukoharjo dapat menyediakan tenaga kerja terampil yang siap bersaing di bursa tenaga kerja regional, nasional, dan internasional. Peningkatan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja perlu dilakukan sebagai upaya penanggulangan pengangguran di Sukoharjo.

Pengangguran dapat diartikan sebagai tidak terserapnya sebagian angkatan kerja ke dalam kesempatan kerja yang diciptakan oleh pencapaian

tingkat pertumbuhan. Tingkat pengangguran yang melebihi 5% dari total angkatan kerja akan berdampak tidak baik bagi pembangunan daerah, maka dari itu sasaran pengangguran terbuka selama periode 5 (lima) tahun ke depan yaitu dari tahun 2010-2015 mampu ditekan. Sementara itu, peningkatan angkatan kerja juga dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Hal ini timbul akibat tidak berjalannya program keluarga berencana dengan baik sebagai alat kontrol laju pertumbuhan penduduk yang pada akhirnya memberikan beban kepada penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

4.2.4. Kesehatan

Tantangan di bidang kesehatan adalah Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pengembangan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat. Secara operasional bagaimana memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk penyelenggaraan kewenangan wajib urusan kesehatan menuju “masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat” yang merupakan visi pembangunan kesehatan Indonesia. Berdasar perkembangan kondisi di Sukoharjo, tantangan 5 (lima) tahun ke depan adalah pelayanan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang diindikasikan dengan peningkatan status gizi masyarakat, penurunan angka kesakitan dan pada gilirannya penurunan faktor resiko yang menyebabkan tingginya angka kematian. Faktor lain yang mempengaruhi indikator kesehatan adalah pelayanan kesehatan dasar, di antaranya adalah jumlah puskesmas, jumlah tenaga bidan desa/kelurahan yang memenuhi standar pendidikan bidan yang dapat melayani pelayanan kesehatan minimal Diploma III (D3). Dalam rangka penyelamatan Ibu dan Anak perlu dilakukan pengembangan pelayanan kegawat daruratan kebidanan dan Bayi Baru Lahir melalui pengembangan Puskemas mampu melaksanakan Pelayanan *Obstetri dan Neonatal Emergency* Dasar (PONED).

Untuk mencapai derajat kesehatan yang diharapkan, upaya yang diperlukan antara lain peningkatan akses pelayanan kesehatan, yaitu peningkatan kualitas ketenagaan, peningkatan fasilitas kesehatan serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat. Sehingga tantangan di bidang kesehatan adalah bagaimana mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Dengan terus meningkatkan pelayanan kesehatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas serta mewujudkan pelayanan kesehatan yang terjangkau baik dari segi biaya maupun kemudahan akses pelayanan yang diterima. Dengan demikian diharapkan dapat mengurangi prosentase status gizi buruk yang tiap tahun masih berfluktuasi, meningkatkan optimalisasi

masyarakat. dalam mengakses pelayanan kesehatan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

4.2.5. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Paradigma pelayanan publik baru mengamanatkan penyelenggaraan pelayanan yang adil bagi semua warga negara. Dengan demikian perlu diupayakan menghadapi tantangan untuk menurunkan PMKS melalui upaya memperluas akses ke pelayanan sosial dasar untuk mempermudah kehidupan para penyandang cacat serta meningkatkan manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial dan menyusun kebijakan kesejahteraan sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial serta memperkuat kelembagaan sosial. Kondisi kesejahteraan sosial masyarakat diindikasikan dengan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Jumlah PMKS di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2009 didominasi oleh masalah fakir miskin, serta masalah anak terlantar dan lanjut usia. Berdasarkan kondisi tersebut upaya untuk meningkatkan penggalan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perlu ditingkatkan sehingga dapat mendorong pemulihan PMKS untuk kembali berperan dan berfungsi di masyarakat sesuai dengan fungsi sosialnya.

4.2.6. Kesenjangan dan Keadilan Gender Serta Pemenuhan Hak Anak

Keberpihakan terhadap peningkatan peran perempuan di seluruh sektor pembangunan perlu dilakukan. Keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan tercermin dari Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Gender. Indeks pemberdayaan gender meliputi keanggotaan perempuan dalam parlemen (10%), perempuan dalam angkatan kerja (42%) dan upah pekerja non pertanian (Rp. 769.000,-). sedangkan Indeks pembangunan gender meliputi Angka Harapan Hidup (AHH) laki-laki dan perempuan, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) laki-laki dan perempuan, Angka Melek Huruf (AMH) laki-laki dan perempuan dan persentasi angkatan kerja. Upaya pengarusutamaan gender masih perlu ditingkatkan, antara lain melalui peningkatan pemahaman tentang pengarusutamaan gender kepada seluruh lapisan masyarakat, peningkatan komitmen pemerintah, serta peningkatan pengarusutamaan gender kepada seluruh program dan kegiatan.

Anak adalah amanah dan merupakan sumber daya pembangunan, juga potensi kekayaan dan kesejahteraan bangsa di masa depan, yang harus kita jaga, kita bina dan kita penuhi hak-haknya, sehingga dapat tumbuh dan berkembang

menjadi anak-anak yang cerdas-ceria, inovatif dan kreatif, bermartabat dan berakhlak mulia. Keberhasilan program perlindungan anak terlihat dari terpenuhinya seluruh hak anak (31 hak anak). Empat hak dasar anak yang harus dapat terpenuhi adalah hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapat perlindungan dari segala perlakuan yang salah serta hak untuk berpartisipasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan diri, sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

4.2.7. Budaya, Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Sukoharjo ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin deras arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Upaya peningkatan jati diri masyarakat Sukoharjo seperti halnya solidaritas sosial, kekeluargaan, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa masih perlu terus ditingkatkan. Budaya berperilaku positif seperti kerja keras, gotong royong, kebersamaan dan kemandirian dirasakan makin memudar. Sehingga diperlukan upaya untuk mengembalikan dan menggali kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.

Pembangunan pemuda sebagai salah satu unsur sumber daya manusia dan tulang punggung serta penerus cita-cita bangsa, terus disiapkan dan dikembangkan kualitas kehidupannya melalui peningkatan aspek pendidikan, kesejahteraan hidup, tingkat kesehatan serta tidak kalah pentingnya penguatan moral berbasis agama dalam rangka mengantisipasi pengaruh globalisasi yang akan merusak sendi-sendi kehidupan pemuda (seks bebas, narkoba, tawuran dll). Untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri, terdapat berbagai wahana baik yang dikembangkan oleh Pemerintah, maupun atas inisiasi masyarakat melalui berbagai organisasi kepemudaan. Pembangunan dan pembinaan olahraga disamping optimalisasi olahraga prestasi, dilakukan juga upaya membangun budaya olahraga dalam masyarakat. Untuk meningkatkan pembinaan olahraga dimaksud diperlukan dukungan sarana dan prasarana olahraga.

4.2.8. Kehidupan Beragama

Kualitas kehidupan beragama di Kabupaten Sukoharjo telah mengarah pada kesadaran masyarakat untuk melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, serta kesadaran dan toleransi antar umat beragama. Kondisi tersebut menciptakan hubungan yang harmonis dan kondusif baik antara sesama

pemeluk agama maupun antar umat beragama. Hal-hal tersebut dapat menunjang kesalehan sosial di masyarakat.

4.3. Bidang Prasarana Wilayah

4.3.1 Kajian Isu Daerah terkait dengan isu Nasional (RTRW Nasional dan MDGs Indonesia)

a. Tingginya angka kemiskinan, angka pengangguran, dan angka pertumbuhan penduduk.

Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah serius dihadapi oleh pemerintah pusat. Propinsi Jawa Tengah maupun kabupaten/kota. Jumlah penduduk miskin di Indonesia menurut kriteria MDGs mencapai 16.5 juta jiwa atau 7.5% pada tahun 2007. Dengan angka pertumbuhan 0,61 % per tahun atau \pm 5.000 jiwa per tahun.

b. Terjadinya krisis energi nasional

Semakin terbatasnya energi fosil dan kelangkaan energi terutama energi listrik di beberapa daerah di Indonesia.

c. Tuntutan *Good Governance*

Tuntutan akan terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bersih masih menjadi isu nasional yang mengemuka. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Oleh karena itu tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan melakukan analisis terhadap lingkungan strategis, baik pada skala nasional maupun regional.

Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik tingkat nasional maupun regional.

Analisis terhadap kondisi lingkungan eksternal yaitu pada tingkat nasional maupun pada tingkat regional masih dijumpai beberapa isu strategis yang menjadi fokus pembangunan, yaitu:

1. Tingginya angka kemiskinan dan angka pengangguran.
2. Kesejahteraan dan perlindungan anak serta kesetaraan gender.

3. Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta tuntutan perwujudan *good government* dan *clean governance* yang semakin kuat.
4. Penurunan kemampuan pembiayaan pembangunan oleh pemerintah dan perlunya peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
5. Perlunya peningkatan efisiensi organisasi perangkat daerah dan kualitas sumberdaya manusia.
6. Perlunya pengembangan perekonomian daerah dan investasi serta penurunan ekonomi biaya tinggi.
7. Perlunya pengembangan sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah.
8. Ancaman stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat.
9. Terjadinya krisis energi nasional.
10. Penurunan kualitas lingkungan dan peningkatan frekuensi terjadinya bencana alam.

d. Penurunan Kualitas Lingkungan, Emisi Gas Rumah Kaca serta frekuensi dan intensitas bencana alam

Penurunan kualitas lingkungan dan emisi rumah kaca akibat pengrusakan hutan, pencemaran lingkungan, aktivitas industri. Di samping meningkatnya intensitas dan frekuensi bencana alam membutuhkan penanganan yang lebih intensif.

Ancaman terhadap meningkatnya degradasi lingkungan dapat terjadi karena kesalahan dalam memformulasikan pengertian otonomi daerah dengan melakukan pembangunan yang berdalih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) apalagi tidak mengikuti prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Adanya kebijakan yang berorientasi pada peningkatan ekonomi tanpa memperhatikan aspek lingkungan, pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan, serta pelanggaran pemanfaatan ruang baik di daerah hulu, tengah, maupun hilir akan menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan yang pada akhirnya akan menurunkan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Ancaman lainnya yang memperparah kerusakan lingkungan adalah aktivitas pembangunan yang dapat merusak sungai, air tanah,

perambahan, dan pembakaran hutan. Alih fungsi lahan menyebabkan rusaknya habitat flora dan fauna sehingga dapat mengancam kelestarian sumberdaya keanekaragaman hayati.

Tantangan yang dihadapi adalah menjaga keseimbangan lingkungan daerah bukit, dataran dan kawasan hutan menjadi satu kesatuan ekologis yang dapat dikelola secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat. Kondisi topografis tersebut berpotensi terhadap permasalahan bahaya tanah longsor. Hal ini perlu diantisipasi sejak dini dan ditetapkan mekanisme pengelolaannya secara tepat. Pertumbuhan lahan kritis harus diupayakan seminimal mungkin.

Peluang pengelolaan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam tahapan perencanaan bisa dimulai dengan upaya untuk menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan kajian lingkungan hidup yang lebih terfokus pada kajian yang bersifat lebih strategis yakni di tingkat kebijakan, rencana dan program. Penerapan KLHS akan diarahkan pada pemberdayaan rencana pembangunan yang bersifat strategis (RPJP, RPJM, RTRW, **RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca** dan sebagainya) yang menekankan pada proses kerjasama dan partisipatif dari seluruh komponen terkait/*stakeholder* secara tripartit (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha). Dengan diterapkannya KLHS ini, juga merupakan landasan didalam mengevaluasi pengaruh lingkungan hidup dan menjamin diintegrasikannya prinsip-prinsip berkelanjutan dalam pengambilan keputusan yang bersifat sinergis dari proses perencanaan pembangunan. Potensi yang dimiliki kabupaten Sukoharjo adalah sumberdaya alam, budaya, adat istiadat/kearifan lokal yang cukup besar. Apabila potensi-potensi tersebut dimanfaatkan dengan baik melalui implementasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara konsisten, maka akan menjadi peluang untuk mengembangkan perekonomian di Kabupaten Sukoharjo yang berwawasan lingkungan.

4.3.2 Kajian Isu Daerah terkait dengan isu Propinsi (RPJMD Provinsi):

Beberapa isu Strategis Provinsi yang mempengaruhi dan terkait dengan keberadaan Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

a. Isu Wilayah

Kesenjangan pembangunan yang cukup tinggi

Di wilayah Jawa Tengah ditemukan bahwa Indeks Williamson Tahun 2006 cukup tinggi yaitu 0,73. Hal ini menunjukkan tingkat kesenjangan pembangunan antar wilayah cukup tinggi. Artinya dalam skala Provinsi ada kabupaten/Kota tertentu yang memiliki PDRB tinggi (Semarang dan Surakarta) tetapi ada yang rendah (misalnya Brebes dan Wonosobo).

Meningkatnya kantung-kantung kemiskinan di daerah perbatasan kabupaten maupun provinsi

Daerah perbatasan Kabupaten maupun Provinsi cenderung kurang berkembang pembangunannya. Wilayah pedesaan cenderung hanya sebagai penyangga (*hinterland*) dengan kondisi sosial ekonomi yang jauh lebih rendah daripada perkotaan sehingga menciptakan kantong-kantong kemiskinan di wilayah perbatasan.

Sarana prasarana Wilayah terkait dengan perhubungan darat (jalan dan KA) belum memadai

Sarana prasarana darat terutama jalan dan kereta api belum memadai. Untuk Kabupaten Sukoharjo kualitas sarana dan prasarana dan sistem keamanan lalu lintas belum memadai. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi jalan dan kondisi alat transportasi darat yang kurang baik.

Pengembangan Kawasan strategis melalui kerjasama antar wilayah/kawasan maupun antar Kabupaten belum optimal

Dengan keterbatasan sumber daya alam masing-masing daerah, maka kerjasama sinergis pengelolaan potensi wilayah perlu ditingkatkan. Disamping itu pengembangan kawasan strategis seperti SUBOSUKAWONOSRATEN (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten), dan sebagainya melalui kerjasama antar wilayah yang selama ini belum optimal.

b. Isu Tata Ruang

RTRW Belum Bersinergi dengan Rencana Pembangunan Daerah

Munculnya permasalahan lingkungan diantaranya disebabkan karena kurang sinerginya penataan ruang dan perencanaan pembangunan daerah

Kerentanan Wilayah terhadap Bencana

Daerah Jawa tengah dengan kondisi alam, gunung dan laut sangat berpotensi terhadap kerawanan bencana alam seperti gempa bumi; tanah longsor, dan juga banjir.

Kondisi Perumahan Belum Memadai

Kondisi perumahan menunjukkan adanya kepadatan di daerah perbatasan Kabupaten Sukoharjo dan Surakarta, terutama perumahan perkotaan.

Tingginya Alih Fungsi Lahan

Dinamika perubahan pemanfaatan ruang sangat tinggi. Banyak lahan pertanian menjadi kawasan perumahan. Dari tahun 1998-2010 didapatkan bahwa perubahan penggunaan tanah untuk perumahan cukup tinggi, akibatnya pemanfaatan penggunaan tanah sawah dan perkebunan turun.

Konsistensi dalam penegakan perda RTRW adalah sebuah komitmen bersama untuk mengendalikan alih fungsi lahan, disamping perlu adanya pemanfaatan lahan yang belum produktif menjadi lahan sawah dan perkebunan melalui pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung.

Rendahnya Pemahaman Pelaku Pembangunan dalam Penataan Ruang

Masih rendahnya ketaatan pelaku pembangunan terhadap rencana tata ruang.

Pertanahan

Menyangkut konflik pemanfaatan fungsi lindung maupun budidaya sesuai dengan RTRW; sawah menjadi non sawah dsb. Di samping itu, sengketa tanah juga terjadi baik di perkotaan maupun di perbatasan.

c. Lingkungan Hidup

Pemanasan Global

Pemanfaatan Sumber Daya Alam telah melampaui kemampuannya. Kondisi tersebut ditengarai dengan timbulnya pemanasan Global (*global warming*), perubahan iklim (*climate change*), pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dampak yang dirasakan berupa krisis pangan, energi serta gangguan keseimbangan siklus air. Di samping itu, terjadi menurunnya daya dukung lingkungan akibat eksploitasi Sumber Daya Alam yang berlebihan, menurunnya konservasi lahan dan hilangnya kawasan lindung.

Berkembangnya kegiatan industri yang berada di kawasan pemukiman dan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor berakibat semakin tingginya emisi gas buang dari asap pabrik maupun asap knalpot.

Menurunnya kualitas lingkungan

Penurunan kualitas lingkungan itu antara lain ditandai dengan pencemaran air, udara dan limbah padat/sampah. Hal itu juga diperparah dengan belum tersedianya aturan perundangan di tingkat daerah yang mengatur pengelolaan lingkungan secara komprehensif.

4.3.3 Kajian Isu–isu Strategis Daerah Kabupaten Sukoharjo (Kajian RTRW; RPJPD)

a. RTRW Kabupaten Sukoharjo dalam skala Propinsi;

Dalam konstelasi regional Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Kartasura masuk kedalam kategori PKL (Pusat Kegiatan Lokal).

Dilihat dari Penggunaan lahannya sebagian wilayah Kabupaten Sukoharjo termasuk dalam Kawasan sawah irigasi teknis. Di samping itu Kabupaten Sukoharjo dalam skala Propinsi diperankan sebagai lumbung pangan terutama padi. (RTRW Kab Sukoharjo).

Kota (Kecamatan) Sukoharjo yang merupakan ibukota Kabupaten Sukoharjo, merupakan pusat orientasi seluruh kecamatan di wilayah kabupaten Sukoharjo menjadi pusat pemerintahan; pusat pendidikan, kesehatan dan pelayanan umum. Pada kawasan pusat Kota (kota Sukoharjo) sudah mulai muncul isu merebaknya Pedagang kaki Lima (PKL) di kawasan-kawasan perdagangan. Selain itu juga muncul di kawasan Solo Baru.

b. Kajian Isu Strategis berdasarkan Fungsi dan Urusan (FISPR)

Energi dan Sumber Daya Mineral

Potensi sumber daya pertambangan di Kabupaten Sukoharjo merupakan penambangan informal sehingga cenderung merusak lingkungan semakin besar karena kurang mendapatkan pengawasan secara optimal. Di samping itu, potensi deposit tambang yang ada belum bisa dimanfaatkan secara efektif. Aparatur dan Sumber Daya Manusia di bidang pertambangan juga belum memadai.

Penataan Ruang Wilayah

1) Kerawanan terhadap Bencana Alam

Daerah Jawa tengah termasuk Kabupaten Sukoharjo merupakan kawasan yang rentan bencana alam terutama gempa dan banjir. Banjir yang hampir terjadi tiap tahun di beberapa kecamatan menyebabkan gagal panen.

2) Tingginya Alih Fungsi Lahan

Kecenderungan beralihnya penggunaan lahan ditengarai dari perubahan tanah sawah menjadi tanah kering 0,28% pertahun. Rata-rata perubahan penggunaan lahan beralih ke fungsi perumahan-permukiman dan industri: seperti pada Kecamatan Sukoharjo; Grogol; Kartasura; Mojolaban dan Baki.

3) Ruang Terbuka Hijau

Kurangnya ruang terbuka hijau perkotaan. Ruang terbuka hijau perlu mendapatkan perhatian ataupun ditambah luasannya, dimaksudkan untuk mengurangi polusi udara dan menambah keasrian kota.

4) Belum optimalnya pengembangan Pariwisata

Potensi Pariwisata yang tidak begitu besar di Kabupaten Sukoharjo berupa obyek wisata alam, wisata buatan dan peninggalan sejarah/ritual belum dikembangkan secara maksimal untuk bisa menarik wisatawan dan peningkatan potensi pengembangan ekonomi wilayah.

5) Kurangnya Sumber Daya Manusia bidang Penataan Ruang

Sumberdaya Manusia dengan kompetensi tata ruang masih sangat terbatas baik dari sisi jumlah maupun kualitas.

6) Belum adanya pemerataan Pembangunan

Disparitas (kesenjangan wilayah) di kabupaten Sukoharjo cukup tinggi. Wilayah Kecamatan (Kota) Sukoharjo, Grogol, Baki dan

Kartasura mempunyai tingkat kepadatan yang relatif tinggi sedangkan daerah-daerah dalam (kantung) seperti Kecamatan Bulu, Weru dan Tawangasari mempunyai tingkat kepadatan yang sangat rendah.

7) Lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang

Tingginya alih fungsi lahan dari pertanian ke permukiman maupun industri serta menurunnya fungsi kawasan persawahan menunjukkan lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang seperti tercantum dalam dokumen RTRW Kabupaten Sukoharjo.

Lingkungan Hidup

Menurunnya kualitas lingkungan serta menurunnya gas rumah kaca dari sektor energi, industri, transportasi, sampah dan hutan terutama di kawasan industri maupun limbah industri kecil serta di area peternakan. Di samping itu, ditengarai ada penurunan kesuburan dan kualitas tanah pertanian akibat penggunaan pupuk kimia, sehingga menjadi masalah tersendiri yang terkait dengan masalah lingkungan di Kabupaten Sukoharjo.

Perumahan dan Fasilitas Umum

1) Pekerjaan Umum

a) Belum memadainya sarana-prasarana pertanian

Kondisi irigasi pertanian di beberapa area mengalami kekurangan air terutama pada musim kemarau. Disamping itu prasarana irigasi yang dibangun pemerintah banyak mengalami kerusakan sehingga mengganggu pengelolaan air persawahan

b) Sarana-prasarana transportasi belum merata

Sarana-prasarana jalan belum menjangkau terutama di daerah-daerah terpencil, meskipun sub-sub terminal kecamatan sudah dikembangkan. Pengembangan Transportasi diperlukan dalam kerangka pengembangan pusat-pusat pelayanan

2) Perumahan Rakyat

Belum terpenuhinya kualitas hunian; lingkungan kehidupan, pertumbuhan wilayah disamping belum adanya keseimbangan antara permukiman perkotaan dan pedesaan. Terjadinya percampuran antara

kehidupan perkotaan dan pedesaan yang agraris. Pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan di dalam kerangka perluasan lapangan kerja, menggerakkan kegiatan ekonomi dan mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Di samping itu, penyediaan rumah layak dan terjangkau menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

4.4 Bidang Pemerintahan

Berdasar perkembangan kondisi pelayanan bidang pemerintahan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, dipetakan beberapa hal yang menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Sukoharjo selama tahun 2010-2015, yang secara khusus terkait dengan tugas pokok dan fungsi bidang pemerintahan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Beberapa tantangan tersebut secara garis besar sebagai berikut.

4.4.1 Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat

Tantangan bagi pemerintah Kabupaten Sukoharjo adalah menjalin koordinasi lintas sektor terkait yaitu Kesbanglinmas, Kantor Polisi, dan pengaduan masyarakat penyebab gangguan dan ketertiban sebagai upaya mengantisipasi adanya gangguan ketertiban; dan menjalin kerjasama dengan masyarakat untuk melembagakan rasa peduli keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga bisa mengantisipasi munculnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini mengingat Kabupaten Sukoharjo dianggap sebagai “sarang” teroris dan karena penyebaran ideologi ekstrim tidak mengenal batas administratif, sehingga perlu diwaspadai adanya kehadiran entitas yang potensial menimbulkan keresahan masyarakat.

4.4.2 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didukung Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)

Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi yang senantiasa mengadopsi perkembangan yang ada, dalam rangka memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Pelayanan publik yang membutuhkan aplikasi teknologi informasi dibutuhkan untuk pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan administrasi ketenagakerjaan, publikasi dan informasi profil pelayanan dan karakteristik daerah. Kondisi penggunaan teknologi informasi menghadapi kendala dalam hal kurangnya perangkat keras, kurangnya tenaga operasional. Jadi tantangan yang dihadapi pemerintah Sukoharjo adalah bagaimana mampu menyediakan perangkat teknologi informasi, dan mengoptimalkan pemanfaatannya untuk meningkatkan kualitas

pelayanan, yaitu dari segi kecepatan pelayanan, kelengkapan dan kemudahan informasi diakses pihak pengguna informasi, dan efisiensi biaya. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi tergantung pada ketersediaan sumber daya manusia yang mengoperasikan dan sosialisasi kemanfaatannya pada semua *stakeholders* yang terkait dengan kebutuhan pelayanan yang disediakan. Tantangan bagi pemerintah Kabupaten Sukoharjo terkait dengan teknologi informasi adalah penambahan perangkat keras yang diperlukan, pelatihan sumber daya manusia pengguna, sosialisasi kepada masyarakat dan *stakeholder* terkait sistem layanan yang disediakan pemerintah berbasis teknologi informasi.

4.4.3 Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik yang demokratis

Tertanamnya kesadaran masyarakat yang tinggi baik dari sisi pentingnya peran mereka dalam menentukan masa depan arah pembangunan maupun kesadaran untuk mewujudkan situasi yang kondusif dalam rangka mendukung penyelenggaraan kehidupan politik yang demokrasi. Tantangan yang dihadapi pemerintah bagaimana secara substantif memberi ruang partisipatif masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan yang diambil pemerintah. Penyusunan regulasi yang memberi payung bagi keterlibatan masyarakat dalam mekanisme demokrasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo merupakan tantangan yang perlu diperhatikan pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

4.4.4 Terwujudnya pelayanan informasi dan komunikasi pemerintah daerah yang optimal

Pemerintah dan masyarakat memerlukan mekanisme komunikasi yang tepat; tepat cara, tepat waktu, dan tepat isi atau tepat pesan informasi. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Sukoharjo yaitu bagaimana memfasilitasi mekanisme dan sarana untuk menciptakan budaya komunikasi yang sehat antara masyarakat dan pemerintah. Tantangan bagi pemerintah menyediakan media komunikasi yang beragam sesuai karakteristik kelompok masyarakat yang ada. Media komunikasi dan informasi yang perlu dioptimalkan sebagai wahana informasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat antara lain melalui web/internet, media koran, radio, TV lokal, papan pengumuman, informasi terstruktur melalui lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dan forum warga yang mungkin akan berkembang dalam kurun waktu kedepan.

Hasil yang diharapkan tidak hanya aparat pemerintah namun masyarakat pun juga mendapat kemudahan untuk memperoleh informasi dengan lengkap

dan cepat terhadap kebutuhan mereka akan pelayanan pemerintah daerah dengan mengoptimalkan peran media massa yang semakin bertambah dan semakin meningkat kualitasnya.

4.4.5 Terbangunnya perpustakaan daerah yang modern

Seiring dengan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan informasi dengan cepat dan lengkap, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk mampu mewujudkan sebuah perpustakaan yang representatif, baik secara fisik dalam bentuk pembangunan gedung dan penambahan bahan pustaka, maupun berupa dukungan sarana prasarana perangkat multimedia yang modern dengan memanfaatkan jaringan komunikasi yang telah terbangun.

4.4.6 Meningkatkan kesadaran hukum dan perlindungan HAM

Memberikan perlindungan HAM dan hak-hak dasar masyarakat merupakan tantangan yang dihadapi pemerintah terkait dengan upaya membangun sistem hukum yang adil dan dapat diandalkan bagi semua kelompok masyarakat.

Untuk meningkatkan kesadaran hukum diperlukan penataan hukum, pemantapan pelaksanaan hukum dan budaya hukum yang pada akhirnya tertuju pada perlindungan hak asasi manusia (HAM). Tantangan praktis yang perlu dijawab pemerintah adalah meningkatkan kesadaran hukum dan menegakkan disiplin aparatur pemerintah melalui penerapan peraturan dan perundang-undangan yang menjunjung tinggi azas keadilan dan kebenaran dengan menyiapkan peraturan daerah dan perangkat hukum daerah, yang pada gilirannya akan berdampak pada perwujudan penegakan hukum dan hak asasi manusia, serta mewujudkan aparatur hukum yang profesional.

4.4.7 Terwujudnya kerjasama antar daerah

Penanganan pembangunan wilayah yang lebih optimal dengan melibatkan peran pihak lain khususnya pemerintah daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sukoharjo dalam wujud kerjasama antar daerah yang sinergis menjadi sebuah tantangan ke depan bagi pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Kerjasama antar daerah yang memerlukan perhatian pemerintah kabupaten dalam tahun 2011–2015 adalah kerjasama dengan pemerintah daerah Kota Surakarta, Kabupaten Karangayar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi, misi, kebijakan dan program RPJMD disusun sebagai penjabaran dari visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk dokumen perencanaan. Dengan memperhatikan kondisi, gambaran umum daerah maupun kebijakan pengembangan pembangunan daerah serta Peraturan Daerah RPJP Daerah Tahun 2005–2025. Penetapan visi dan misi RPJMD adalah untuk menjembatani kondisi masa kini dengan kondisi masa depan, mengklarifikasi arah dan tujuan organisasi serta menumbuhkan inspirasi dan tantangan pembangunan.

Berdasarkan hal di atas Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015 dirumuskan sebagai berikut:

5.1. VISI

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUKOHARJO YANG SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL”

Visi tersebut memiliki makna bahwa selama lima tahun kedepan merupakan tahap kedua pembangunan jangka panjang, yang memiliki *empat kunci pokok* yakni :

Sejahtera

Mengandung makna dalam lima tahun ke depan akan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Sukoharjo yang berdampak pula pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai guna mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sukoharjo;

Maju

Mengandung Makna Kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta berwawasan ke depan;

Bermartabat

Mengandung makna kondisi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan etika, moral, maupun norma agama masyarakat;

Profesional

Mengandung Makna bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Partisipatif, Akuntabel, Transparan dan Efisien) dan bersih (bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Secara keseluruhan visi tersebut mengandung pengertian bahwa dalam jangka waktu lima tahun kedepan, dapat terwujud kabupaten Sukoharjo yang memenuhi kebutuhan ekonomi baik material maupun spiritual sehingga dapat melayani seluruh aktivitas masyarakatnya, dengan didukung sumberdaya manusia yang berahklak mulia dan berwawasan kedepan dengan tetap memperhatikan keberadaan potensi ekonomi lokal, dalam bingkai dan tatanan masyarakat yang senantiasa dijiwai oleh nilai-nilai budi pekerti luhur yang didukung oleh pemerintahan yang profesional guna mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Sukoharjo.

5.2. MISI

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Sukoharjo 2010-2015 tersebut, maka dijabarkan dalam 5(lima) misi yang menjadi pedoman bagi pembangunan Kabupaten Sukoharjo:

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan Infrastruktur yang Terukur, Terarah, Adil dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup;

Melalui misi ini pemerintah Kabupaten Sukoharjo ingin meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat dengan meningkatkan fasilitas pelayanan pendidikan baik jumlah, kualitas terutama penyebarannya, namun perluasan kesempatan belajar ini dibarengi pula dengan relevansi jenis dan jenjang pendidikan dengan kebutuhan masyarakatnya sehingga perluasan pendidikan dimaksud dapat efektif dan efisien. Selain itu pemerintah Kabupaten Sukoharjo ingin meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pola hidup sehat, pemerataan pelayanan kesehatan, meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan serta peningkatan kualitas gizi masyarakat yang tiap tahunnya terus melanda Sukoharjo dan berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia. Melalui misi ini pula pemerintah Sukoharjo memandang peningkatan kesejahteraan masyarakat juga perekonomian, sangat bergantung pada kelayakan infrastruktur pembangunan yang ada. Untuk itu dalam lima tahun kedepan, pemerintah akan meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur baik dalam jumlah, kualitas serta penyebarannya terutama sarana dan prasarana pertanian, transportasi darat, pendidikan,

kesehatan dan ekonomi serta infrastruktur perumahan dan permukiman, dengan selalu memperhatikan Pelestarian Lingkungan Hidup.

2. **Membangun Manajemen Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan yang Berbasis pada Pelayanan Masyarakat;**

Melalui misi ini Bupati dan Wakil Bupati ingin menata dan membina aparatur pemerintah secara profesional serta menempatkan supremasi hukum sebagai landasan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, dengan mengedepankan norma/kaidah hukum dalam masyarakat serta nilai-nilai sosial dan rasa keadilan masyarakat dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*) dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat dengan slogan *“Melayani dengan Ihklas”*, serta *mengembangkan sistem reward and punishment*.

3. **Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tentram, Demokratis dan Dinamis;**

Keamanan, ketertiban dan ketentraman merupakan kondisi yang diharapkan masyarakat melalui misi ini diharapkan agar masyarakat Sukoharjo dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, dan merupakan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bersama. Kondisi yang aman, tertib dan tenteram akan terwujud apabila terdapat kesadaran kolektif dan komitmen dari seluruh stakeholder pembangunan terhadap berbagai ketentuan yang telah disepakati bersama, yang direalisasikan dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan hukum.

4. **Mendorong Kemandirian Ekonomi yang Berbasis pada Pertanian dan Industri serta Pengelolaan Potensi Daerah;**

Melalui misi ini bupati dan wakil bupati ingin meningkatkan kesejahteraan penduduk yang saat ini cukup memprihatinkan akibat masih tingginya angka kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya pendapatan perkapita, meningkatnya angka pengangguran, belum berkembangnya sektor riil serta rendahnya pertumbuhan dan produktivitas Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Koperasi. Untuk itu perekonomian Sukoharjo yang saat ini masih mengandalkan sektorsektor tradisonal harus juga memperhatikan sektor-sektor non tradisional seperti industri dan tersier khususnya jasa-jasa dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada yaitu pertanian.

5. **Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat;**

Keimanan dan ketaqwaan adalah landasan moral dan etika yang tidak hanya memiliki muatan spiritual, tetapi juga muatan sosial, sehingga pada prakteknya tidak saja ditunjukkan dengan ketaatan ritual individu, tetapi juga harus

diaplikasikan dalam kehidupan sosial, sehingga tercipta kesalehan kolektif untuk merajut kehidupan bersama. Kesalehan sosial sebagai perwujudan sifat masyarakat bertaqwa merupakan kesatuan utuh dari pengetahuan, sikap serta nilai-nilai yang mempengaruhi cara berfikir dan bertindak. Dalam perspektif agama, keimanan dan ketaqwaan yang terrefleksikan dalam kesalehan sosial merupakan syarat mutlak bagi tercapainya kesejahteraan.

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Dalam upaya pencapaian visi dan misi, diformulasikan menjadi 4 (empat) agenda pembangunan daerah. Keempat agenda besar dimaksud berikut tujuan dan sasarannya adalah sebagai berikut:

1. Agenda Pembangunan Manusia

Agenda ini dimaksudkan untuk memacu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Agenda pembangunan manusia memuat dua tujuan besar dan beberapa sasaran sebagai berikut :

a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam konteks ini, tujuan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) diukur dari meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan dan kapasitas ekonomi masyarakat miskin. Untuk itulah, sasaran yang akan dicapai dalam mendukung tujuan “meningkatkan kualitas sumber daya manusia” adalah :

- 1) Meningkatnya Kualitas Pendidikan.
- 2) Meningkatnya Kualitas Kesehatan.
- 3) Meningkatnya Kapasitas Ekonomi Masyarakat Miskin.

b. Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik

Tujuan ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme aparatur daerah, kualitas pelayanan publik, dan iklim demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan. Beberapa sasaran yang akan dicapai untuk mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik adalah:

- 1) Terwujudnya Penguatan Desa.
- 2) Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 3) Terlaksananya Inisiasi *E-gov (Electronic Government)* / Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi.
- 4) Meningkatnya Kesadaran Berwarganegara.

2. Agenda Penguatan Landasan Sistem Inovasi

Agenda penguatan landasan sistem inovasi meliputi 4 (empat) tujuan yang hendak diraih yaitu :

a. Membangun Sistem Informasi Basis Data

Tujuan ini lebih dititikberatkan pada upaya membangun sistem informasi data yang lebih mendasar. Ada beberapa sasaran yang dirumuskan untuk mendukung tercapainya tujuan “Membangun Sistem Informasi Basis Data” yaitu :

- 1) Terbangunnya Sistem Informasi Kependudukan
- 2) Terbangunnya Sistem Informasi Tata Ruang
- 3) Terbangunnya Sistem Informasi Daya Dukung Wilayah
- 4) Terbangunnya Sistem Informasi Hasil-hasil Pembangunan.

b. Membangun Kerjasama Antar Daerah

Dalam rentang waktu lima tahun ke depan, tujuan ini terkonsentrasi pada upaya membangun dialog antar daerah, terutama dengan daerah tetangga, yang ditindaklanjuti dengan penumbuhan kelembagaan program kolektif. Sasaran yang akan dicapai untuk mendukung tujuan ini adalah terwujudnya regionalisasi daerah.

c. Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Guna termemanfaatkannya teknologi informasi dan komunikasi, sasaran yang akan dicapai dalam waktu lima tahun kedua dari tahapan RPJP adalah :

- 1) Terbangunnya Infrastruktur TIK
- 2) Terbangunnya Sistem Komunikasi Data
- 3) Terlaksananya TIK Kependidikan

d. Meningkatkan Aktivitas Penelitian dan Pengembangan

Selama ini perhatian Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terhadap aktivitas Litbang masih cukup rendah. Padahal kegiatan Penelitian dan Pengembangan menjadi bagian penting dari sebuah bangunan sistem inovasi. Menyadari hal tersebut, secara bertahap dalam lima tahun mendatang ditetapkan beberapa sasaran yang ingin direalisasikan, yaitu:

- 1) Meningkatkan Aktivitas Litbang Pemerintah
- 2) Tumbuhnya Budaya Litbang Masyarakat
- 3) Berkembangnya Pengetahuan Tradisional.

3. Agenda Peningkatan Daya Saing Daerah

Agenda ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menekankan bahwa salah satu harapan dari pemberian otonomi daerah adalah agar daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Untuk memaknai agenda ini, ada tiga tujuan yang hendak dicapai yaitu :

a. Melaksanakan Penguatan Lingkungan Usaha

Upaya penguatan lingkungan usaha sebagai salah satu tujuan harus dilakukan agar daerah mampu berdaya saing. Adapun fokus sasaran adalah sebagai berikut :

- 1) Terbangunnya Fasilitas Perdagangan
- 2) Meningkatnya Penanaman Modal
- 3) Terwujudnya Reformasi Kebijakan Bisnis
- 4) Tumbuh dan Berkembangnya Formasi Rumpun Usaha

b. Mewujudkan Eko-efisiensi

Keberhasilan daerah dalam meningkatkan daya saing harus tetap memperhatikan eko-efisiensi. Ada dua sasaran yang akan digarap guna mendukung tujuan tersebut, adalah :

- 1) Terwujudnya Sistem Insentif Untuk Eko-Efisiensi
- 2) Terwujudnya Pembinaan Sistem Produksi

c. Memembangkan Industri Kreatif

Tujuan ini dimaksudkan untuk mengakomodasi potensi Kabupaten Sukoharjo yang bertumpu pada kreativitas, keahlian dan talenta sumber daya manusia yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tumbuhnya industri kreatif diharapkan dapat mendorong terciptanya sumber daya manusia yang mampu bersaing dengan kualitas yang dapat diandalkan. Sasaran yang dirumuskan untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut adalah:

- 1) Tumbuhnya Inisiasi Rumpun Usaha Kreatif (Klaster Industri Kreatif)
- 2) Meningkatnya Perolehan HKI

4. Agenda Pemulihan dan Perlindungan

Pembangunan yang berkelanjutan harus senantiasa memperhatikan lingkungan. Itulah sebabnya, perlu adanya agenda pemulihan dan perlindungan yang diuraikan ke dalam tujuan-tujuan sebagai berikut :

a. Mewujudkan Perlindungan Terhadap Keluarga

Tatanan kehidupan masyarakat yang baik tumbuh dari keluhuran nilai-nilai keluarga. Dengan demikian keberadaan keluarga memiliki arti penting dalam membangun suatu daerah. Menjaga keutuhan keluarga agar dapat memberikan kontribusi keberlanjutan pembangunan perlu dilakukan. Oleh karena itu, perlu menetapkan sasaran untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas. Adapun sasaran-sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya Perlindungan terhadap ancaman dari luar lingkup keluarga.
- 2) Terwujudnya Perlindungan terhadap KDRT.

- 3) Tersediannya bantuan sosial
 - 4) Terwujudnya Perkuatan Moral Agama.
- b. Mewujudkan Perlindungan Terhadap Lingkungan

Selain lingkungan keluarga, agenda pemulihan dan perlindungan juga ditujukan untuk perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup yang lebih difokuskan pada upaya pemulihan kerusakan ekosistem pertanian, dan lahan pertanian. Oleh karena itu, sasaran yang ingin diraih guna mendukung tercapainya tujuan tersebut, adalah :

- 1) Terpulihkannya Kerusakan Ekosistem Pertanian
- 2) Terpulihkannya Kerusakan Lahan Pertanian
- 3) Tertanganinya Bencana Alam.

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi ditetapkan strategi sebagai tahapan untuk mencapai tujuan spesifik dan tertentu. Selanjutnya untuk menuntun upaya tercapainya tujuan spesifik itu diperlukan arah kebijakan yang jelas dan terarah. Strategi dan arah kebijakan pada RPJM Daerah Kabupaten Sukoharjo akan diuraikan berikut ini:

6.1. Strategi

1. Pemantapan pembangunan manusia seutuhnya untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan mendukung pelaksanaan *good governance*.
2. Penyediaan data (database) melalui penyempurnaan secara sistematis, menitikberatkan pada sistem informasi kependudukan, tata ruang dan daya dukung wilayah serta hasil pembangunan daerah.
3. Membangun sistem inovasi melalui Penataan Basis Data dan Peningkatan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) sebagai landasan penyelenggaraan regionalisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
4. Peningkatan Daya Saing Daerah melalui penguatan lingkungan usaha dan penumbuhan industri kreatif dengan memperhatikan eko efisiensi.
5. **Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan serta, mengakiri kerusakan sumber daya alam**, pemulihan kerusakan ekosistem pertanian untuk menjamin keberlanjutan pembangunan berwawasan lingkungan
6. Perlindungan keluarga dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan pengaruh negatif faktor eksternal dengan penanaman dan penguatan nilai-nilai moral agama.
7. Peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian guna menjamin penyediaan pangan sesuai kebutuhan untuk memantapkan ketahanan pangan.

7.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dibagi dalam empat agenda besar sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pembangunan wilayah/desa dilaksanakan dengan mengedepankan pemahaman terhadap kewenangan dan tanggungjawab serta peningkatan kapasitas pengelolaan pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan harus diperkaya dengan muatan kewirausahaan dan dijiwai semangat gotong-royong dalam seluruh kegiatan pembangunan. Kegotongroyongan ini juga dapat diarahkan untuk mengelola ruang terbuka publik yang banyak

terdapat di Kabupaten Sukoharjo untuk memicu peningkatan budaya sehat, budaya belajar, aktivitas ekonomi, maupun pengembangan seni dan budaya.

2. Penguatan Landasan Inovatif

Beberapa hal yang dipandang dapat memperkuat landasan inovatif seperti infrastruktur TIK yang mulai dibangun, dipercepat pemanfaatannya untuk semua bidang kegiatan baik itu Layanan Pemerintah, pendidikan dan pengetahuan, maupun perdagangan dan investasi. Belanja pemerintah (*government procurement*) diarahkan untuk memicu inovasi. Apabila terdapat belanja pemerintah yang cukup besar, kegiatan besar rutin seperti peringatan hari jadi Kabupaten Sukoharjo dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai ajang inovasi guna memicu kegiatan ekonomi masyarakat Kabupaten Sukoharjo.

3. Peningkatan Daya Saing Daerah

Daya saing daerah antara lain sangat dipengaruhi oleh produk unggulan daerah. Pendayagunaan budaya dan kearifan lokal merupakan agenda strategis untuk memunculkan keunggulan daerah. Keunggulan daerah sudah barang tentu dipengaruhi oleh berkembangnya ekonomi pedesaan. Pemfokusan pengembangan ekonomi desa ini dapat dilakukan dengan metoda satu daerah satu produk (*One Village One Product*)/(OVOP) atau sentralisasi industri kecil. Tentu saja hal ini dilakukan tanpa mengesampingkan pengembangan ekonomi kecil di perkotaan, yaitu dengan memasukkan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai pelaku penting kegiatan ekonomi. Implikasi dari hal tersebut perlu dilakukan pendaftaran dan penyediaan ruang usaha bagi PKL. Keberhasilan peningkatan daya saing ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan memerlukan keterlibatan sumber daya kemitraan di luar Kabupaten Sukoharjo (termasuk masyarakat Sukoharjo yang berdomisili di luar Kabupaten Sukoharjo). Keterlibatan sumber daya kemitraan dalam berbagai hal, termasuk dalam pembangunan fisik (pabrik besar, jembatan dll.) di Kabupaten Sukoharjo perlu dilengkapi dengan rencana perluasan efek ganda, sehingga diperoleh manfaat yang maksimal.

4. Pemulihan dan Perlindungan

Prinsip pembangunan berkelanjutan perlu menjiwai setiap kebijakan daerah. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi diarahkan ramah lingkungan. Penerapan hal tersebut, antara lain dalam menyikapi isu kelangkaan energi dunia diantisipasi dengan menginisiasi peragaman sumber energi alternatif di pedesaan, terutama energi terbarukan. Selain itu untuk kepentingan baik

kesehatan, kelestarian sumber daya pertanian, lingkungan, maupun ekonomi maka tema organik perlu diterapkan.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam arah kebijakan ini memandang penting dan mendorong lebih berperannya keluarga dan sektor swasta dalam pembangunan daerah, baik dalam pemulihan dan perlindungan lingkungan fisik (lingkungan hidup) maupun lingkungan sosial (pendidikan, kesehatan, isu gender seperti penyetaraan upah perempuan, dan budaya).

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM

DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk mencapai tujuan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015 perlu adanya kebijakan yang merupakan arah/tindakan yang diambil dan diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Kebijakan tersebut lebih lanjut diimplementasikan melalui berbagai program pembangunan daerah yang merupakan instrumen kebijakan, yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Sejumlah kebijakan dan program sebagai tindak lanjut berbagai strategi yang dirumuskan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan.

Salah satu upaya untuk memutus rantai kemiskinan adalah dengan peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, program penuntasan pendidikan dasar perlu dilakukan, karena tingkat pendidikan sebagian besar penduduk Kabupaten Sukoharjo di atas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Lebih dari itu, pendidikan sangat menentukan kemajuan dan kemakmuran bangsa. Oleh karena itu, perlu adanya program pembinaan potensi unggul bagi generasi muda dan program peningkatan budaya belajar (*life long learning*, minat baca). Sudah barang tentu upaya percepatan peningkatan mutu pendidikan ini tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah semata, tetapi perlu program pelibatan masyarakat peduli pendidikan, termasuk swasta.

2. Peningkatan Derajat Kesehatan.

Kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Sukoharjo dari tahun ke tahun semakin membaik, hal ini ditunjukkan dengan adanya kecenderungan kenaikan angka usia harapan hidup. Untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan maka perlu program peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang mencakup peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit, peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta pengembangan manajemen kesehatan dan Sistem Informasi Kesehatan (SIK), program peningkatan kecukupan pangan dan gizi, dan program pengembangan budaya sehat.

3. Pemberdayaan Masyarakat Miskin.

Jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Sukoharjo dari tahun ke tahun mengalami kecenderungan penurunan. Namun demikian, jumlah masyarakat miskin dari awal pelaksanaan RPJM Daerah ini masih cukup besar. Kemiskinan ditunjukkan dari fenomena kesenjangan atau kelemahan masyarakat atau kelompok masyarakat terhadap akses sumber daya. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kelompok masyarakat miskin melalui program pengembangan lembaga keswadayaan masyarakat, serta penguatan kelompok marginal yang terutama disandang oleh kaum perempuan melalui program peningkatan kapasitas perempuan di pedesaan.

4. Peningkatan Kapasitas Desa.

Kelompok tertinggal sebagian besar terletak di desa. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya afirmasi/pemberdayaan terhadap desa. Pemberdayaan ini tentu saja dimulai dari lembaga pemerintah dan mitra yang ada di desa melalui program peningkatan kapasitas aparat desa melalui program peningkatan infrastruktur desa, kapasitas dan kelembagaan dan kemitraan desa.

5. Inisiasi *E-gov (Electronic Government)*/Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi

Implementasi kebijakan pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas layanan publik. Layanan publik yang transparan, cepat, tepat, mudah, murah, dan ramah menjadi dambaan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan instrumen pendukung. Dalam hal ini kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui kebijakan *Electronic Government*.

6. Implementasi Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Pemerintahan yang baik ini ditentukan oleh kemampuan, pengawasan, serta sistem pembinaan dari aparat pemerintah. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan program peningkatan kompetensi penyelenggaraan pemerintah daerah dan program peningkatan kapasitas pengawasan dengan penerapan sistem penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) serta falsafah "*melayani dengan ikhlas*".

7. Peningkatan Wawasan Kebangsaan.

Tujuan pembangunan hanya dapat dicapai melalui tata kelola pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan adanya peran serta seluruh pemangku kepentingan mulai dari penelaahan masalah, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta penikmatan hasil dari agenda pembangunan. Dalam rangka mendorong peran serta pemangku kepentingan perlu program peningkatan kesadaran politik masyarakat yang didukung dengan terciptanya suasana yang kondusif melalui pelaksanaan program peningkatan tertib berwarganegara.

8. Kebijakan Penataan Basis Data Kependudukan.

Kebijakan ini dimaksudkan untuk memenuhi kecukupan data dan informasi tentang kependudukan sebagai pijakan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan peristiwa kependudukan dan berbagai permasalahan yang melekat di dalamnya. Dalam penerapannya, kebijakan ini dijalankan melalui program penyempurnaan data kependudukan. Keberhasilan atas pelaksanaan kebijakan dan program tersebut, diharapkan akan mendukung terbangunnya sistem informasi kependudukan.

9. Kebijakan Penataan Basis Data Tata Ruang.

Guna terselenggaranya proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan memerlukan tersedianya basis data tata ruang yang valid dengan menerapkan kebijakan penataan basis data tata ruang yang diimplementasikan melalui program pengembangan data tata ruang. Terlaksananya kebijakan dan program dimaksud menjadi kontribusi bagi terbangunnya sistem informasi tata ruang.

10. Kebijakan Penataan Basis Data Daya Dukung Wilayah.

Efektivitas dan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sangat dipengaruhi seberapa besar daya dukung wilayah. Sementara itu, untuk mengetahui potensi daya dukung wilayah perlu adanya kebijakan yang mengarah pada upaya penataan basis data daya dukung wilayah, yang rencana aksinya dilaksanakan melalui program identifikasi daya dukung alam, **rencana aksi penurunan emisi Gas Rumah Kaca** dan program identifikasi daya dukung infrastruktur wilayah. Keluaran dari kebijakan dan program tersebut diharapkan dapat mendukung terbangunnya sistem informasi daya dukung wilayah.

11. Pemanfaatan Informasi Hasil - Hasil Pembangunan.

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendukung terbangunnya sistem informasi hasil-hasil pembangunan. Kebutuhan, pemanfaatan dan pengembangan sistem informasi hasil-hasil pembangunan diarahkan untuk mendukung kinerja peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas pemerintah daerah serta untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang maju dan sejahtera. Itulah sebabnya, aplikasi dari kebijakan ini diejawantahkan melalui program penerapan keterbukaan informasi, dan program mendorong pemanfaatan keterbukaan informasi.

12. Peningkatan Dialog Antar Daerah.

Dalam rangka merintis terjalinya kerjasama daerah. Dipandang perlu untuk mengintensifkan dialog antardaerah dengan menerapkan kebijakan peningkatan dialog antardaerah melalui program penumbuhan dialog antarwilayah.

13. Peningkatan Kerjasama Antar Daerah.

Kerjasama merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Melalui kebijakan peningkatan kerjasama antardaerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum, khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antardaerah dan daerah tertinggal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah. Implementasi kebijakan tersebut dijalankan melalui program penanganan wilayah perbatasan dan program peningkatan kolaborasi regional tematik.

14. Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Salah satu hal yang diyakini dapat memperkuat landasan inovatif adalah ketersediaan infrastruktur TIK. Sementara itu kebijakan yang dipandang relevan untuk mendukung terbangunnya infrastruktur TIK adalah pengembangan jaringan TIK, yang dalam tataran operasional, dilaksanakan melalui program pengembangan jaringan teknologi informasi dan komunikasi dan program pengaturan piranti lunak.

15. Penataan Sistem Komunikasi Data.

Kebijakan penataan sistem komunikasi data merupakan bagian integral dari kebijakan penataan berbagai jenis basis data. Dengan kebijakan ini diharapkan adanya upaya standarisasi dan integrasi data. Oleh karena itu, untuk menindaklanjuti kebijakan ini perlu penerapan program standarisasi data dan program integrasi data agar sistem komunikasi data terbangun dengan baik.

16. Peningkatan Kualitas Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi hendaknya dapat disikapi untuk mendorong kemajuan daerah dalam berbagai bidang, termasuk di antaranya kemajuan dalam bidang pendidikan. Kebijakan peningkatan mutu pendidikan yang berbasis TIK yang di implementasikan melalui program penerapan manajemen pendidikan berbasis TIK dipandang perlu untuk menangkap peluang pesatnya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi di bidang pendidikan.

17. Optimalisasi Peran Penelitian dan Pengembangan (Litbang).

Peran litbang harus dioptimalkan, baik sebagai *research agenda maker* (problem) maupun *research goal setter* (solusi) di daerah agar daerah mampu berdaya saing, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, Litbang pemerintah daerah harus terpercaya, *resourceful* dan diperankan sebagai Komunikator yang efektif bagi beragam simpul litbang di daerah. Untuk mendorong hal tersebut, perlu kebijakan optimalisasi peran Litbang yang dalam penerapannya dilaksanakan melalui : (a) Program peningkatan kapasitas lembaga Litbang, (b) Program kerjasama antar lembaga Litbang, dan (c) Program publikasi hasil Litbang.

18. Peningkatan Insentif Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Masyarakat.

Peningkatan kapasitas iptek sistem produksi dan difusi iptek perlu adanya stimulan dan rangsangan berupa insentif untuk mendorong kegiatan Litbang masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah kebijakan peningkatan insentif Litbang masyarakat agar kegiatan Litbang masyarakat semakin berkembang. Tindak lanjut kebijakan tersebut dilaksanakan melalui program penumbuhan kegiatan Litbang masyarakat dan program apresiasi dan pemanfaatan hasil Litbang.

19. Inventarisasi Pengetahuan Tradisional.

Secara garis besar pengetahuan tradisional merupakan hasil proses kreatif komunal dan sosial antargenerasi yang menunjukkan dan mencerminkan sejarah komunikasi, budaya dan jati diri sosial pada komunitas, dan sistem nilai pada komunitas. Upaya perlindungan terhadap kreativitas dan inovasi berbasis tradisi perlu diawali dengan langkah identifikasi dan inventarisasi pengetahuan tradisional. Komitmen untuk menyikapi hal tersebut dituangkan dalam sebuah kebijakan inventarisasi pengetahuan tradisional, dan pada tahap awal ditindaklanjuti melalui program identifikasi pengetahuan tradisional.

20. Penyediaan Fasilitas Perdagangan.

Sektor perdagangan menduduki peringkat kedua dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB, yaitu sebesar 27 %. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan sangat potensial untuk dikembangkan. Itulah sebabnya, dibutuhkan kebijakan penyediaan fasilitas perdagangan guna mendukung aktivitas perdagangan. Kebijakan tersebut dalam penerapannya dilaksanakan melalui program pengembangan infrastruktur perdagangan.

21. Peningkatan Investasi.

Investasi adalah salah satu jalur hubungan daerah dengan berbagai pihak. Investasi memiliki arti penting bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan dan transfer keahlian dan teknologi. Dengan demikian investasi

dapat menjadi salah satu solusi dalam memecahkan persoalan kemiskinan dan pengangguran. Menyadari urgensi investasi maka perlu adanya kebijakan peningkatan investasi dan rencana aksi yang dapat memberikan daya tarik bagi tumbuh dan berkembangnya investasi, melalui program pembangunan pelibatan sumber daya paseduluran, program penciptaan iklim yang mendukung investasi, program peningkatan infrastruktur investasi, dan program pemasaran aktif.

22. Reformasi Kebijakan Bisnis.

Kebijakan ini diperlukan dengan maksud untuk menciptakan iklim bisnis yang kondusif. Oleh karena itu, kebijakan bisnis yang dinilai menghambat perkembangan bisnis di daerah perlu dikaji dan dilakukan penyempurnaan. Untuk mendukung kebijakan tersebut, dapat dilakukan dengan penerapan program penyederhanaan regulasi bisnis, dan program penciptaan lingkungan legal dan regulasi kondusif.

23. Pengembangan Rumpun Usaha.

Upaya perkuatan rumpun usaha yang saling terkait dalam rantai nilai perlu dilakukan untuk memberikan ungkitan besar pada pendapatan masyarakat. Pada dasarnya setiap pelaku pada mata rantai nilai adalah organ ekonomi yang hidup dan membutuhkan perkuatan untuk meningkatkan aliran barang, jasa, uang, informasi dan pengetahuan. Itulah sebabnya diperlukan adanya kebijakan pengembangan rumpun usaha yang dilaksanakan melalui program peningkatan kolaborasi ekonomi dan program peningkatan skema pembiayaan berisiko.

24. Pengembangan Eko-Efisiensi.

Melalui kebijakan ini para pelaku usaha dilibatkan untuk memanfaatkan secara efisien sumber daya yang dimiliki termasuk mengoptimalkan potensi ekonomi dan sosial yang ada di sekitarnya. Kebijakan pengembangan eko-efisiensi melalui pendekatan eko-efisiensi dapat diterapkan dengan mengembangkan usaha kecil dan menengah yang ramah lingkungan, yang pada prinsipnya adalah menyelaraskan perbaikan lingkungan dengan menyentuh sektor ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam tataran operasional kebijakan dan pendekatan pengembangan eko-efisiensi diaplikasikan melalui program pengembangan insentif dan disinsentif.

25. Perbaikan Sistem Produksi.

Dalam dunia usaha, peningkatan produksi menjadi target utama yang terkadang kurang memperhatikan kondisi lingkungan. Fenomena ini merupakan persoalan serius yang harus segera memperoleh perhatian. Akar permasalahannya terletak pada bekerjanya sistem produksi yang dibangun. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan perbaikan sistem produksi dalam rangka mewujudkan penguatan industri yang ramah lingkungan dan penataan daerah industri. Untuk mendukung kebijakan

tersebut, terdapat dua program yang akan dijalankan, yaitu program penguatan industri ramah lingkungan dan program penataan daerah industri.

26. Inisiasi Klaster Industri Kreatif.

Pengembangan industri kreatif harus tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional. Beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan industri kreatif adalah sumber daya manusia, anggaran, teknologi penunjang, kebijakan pemerintah, dan infrastruktur fisik. Tahapan yang paling sulit dalam pengembangan industri kreatif adalah penciptaan apresiasi terhadap industri kreatif itu sendiri. Pengembangan industri kreatif adalah penciptaan apresiasi terhadap industri kreatif itu sendiri. Pengembangan industri kreatif berikutnya membutuhkan adanya kebijakan inisiasi klaster industri kreatif yang diterapkan melalui: (a) program pengembangan nilai ekonomi kegiatan kreatif; (b) program peningkatan transaksi industri kreatif; dan (c) program perbaikan lingkungan klaster.

27. Pembudayaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Dalam tatanan ekonomi modern, HKI merupakan suatu hal yang sangat penting utamanya untuk melindungi keberadaan setiap produk bisnis dan jasa yang dijalankan. Pelaksanaan dan perlindungan HKI akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong investasi dan pengalihan teknologi secara cepat, serta merangsang daya saing masyarakat dan perusahaan setempat. Untuk menyadarkan masyarakat akan urgensi HKI diperlukan kebijakan pembudayaan HKI, yang diimplementasikan melalui program perlindungan dan pemanfaatan HKI dan program fasilitasi perolehan HKI.

28. Peningkatan Manajemen Masalah Sosial.

Mengatasi masalah sosial di daerah tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi dibutuhkan adanya manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial, guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, dan perlindungan sosial. Dengan demikian, penanganan masalah sosial yang selama ini dilakukan perlu ditingkatkan dengan menetapkan kebijakan peningkatan manajemen masalah. Kebijakan tersebut lebih lanjut diterapkan melalui : (a). Program pengembangan partisipasi kelembagaan peduli Pekat dan PMKS, (b). Program pengembangan unit rehabilitasi Pekat, dan (c). Program pengembangan unit penanganan PMKS. (d). Program Santunan Sosial Kematian serta (e).Kemitraan dengan dunia usaha (*Corporate Social Responsibility/CSR*)

29. Antisipasi Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Pada dasarnya KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kebijakan antisipasi tindak KDRT sangatlah dibutuhkan agar tindak KDRT ke depan tidak semakin bertambah. Kebijakan tersebut secara operasional dilaksanakan melalui program penguatan lembaga perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender.

30. Peningkatan Kesalehan Sosial.

Kebijakan ini terlahir sebagai bentuk keprihatinan akan kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya menjadikan kesadaran beragama sebagai titik tolak terciptanya kehidupan yang lebih baik pada tingkat kolektif. Kesadaran beragama sebagai titik tolak terciptanya kehidupan yang lebih baik pada tingkat kolektif. Kesadaran beragama yang mestinya melahirkan kesalehan sosial ternyata mulai kehilangan sukma dalam implementasinya. Oleh karena itu, kesadaran beragama harus dimaknai dan didorong untuk mampu melahirkan kesalehan sosial melalui program perkuatan forum komunikasi antar umat dan program dukungan aktivitas keagamaan.

31. Pelestarian Ekosistem Pertanian.

Kabupaten Sukoharjo memiliki wilayah pertanian yang cukup luas tersebut ternyata kondisinya relatif memprihatinkan karena banyaknya pengalihan fungsi. Fenomena ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas pembangunan perumahan dan industri. Oleh karena itu diperlukan Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pertanian, yang didukung dengan Program penataan wilayah.

32. Pemeliharaan Sumber Daya Air.

Peningkatan kualitas daerah tangkapan air ini perlu dilaksanakan melalui program rehabilitasi daerah tangkapan air dan program peningkatan partisipasi masyarakat.

33. Perlindungan Hutan.

Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat penting dalam mempengaruhi iklim mikro dan hidrologi suatu wilayah. Luas hutan baik hutan negara maupun hutan rakyat di Kabupaten Sukoharjo masih dibawah luas ideal yaitu masih kurang dari 30% luas wilayah. Hal ini perlu dipacu dengan pelaksanaan program reboisasi hutan. Pengalaman menunjukkan keterlibatan masyarakat sangat menentukan keberhasilan perlindungan hutan. Oleh sebab itu, perlu digalakkan program peningkatan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan.

34. Kewaspadaan dan Penanganan Bencana Alam.

Kabupaten Sukoharjo termasuk daerah rawan bencana alam. Hampir setiap tahun di beberapa wilayah terlanda banjir, kekeringan, tanah longsor, dan lain-lain. Untuk itu diperlukan langkah-langkah untuk menekan dampak yang lebih parah dari fenomena alam tersebut, melalui penerapan program antisipasi bencana alam serta program pencegahan dan pemulihan bencana alam.

35. Peningkatan Moral Generasi Muda.

Kabupaten Sukoharjo termasuk daerah penyangga Kota Solo, yang tentunya mempunyai dampak baik positif maupun negatif, dampak negatif kehidupan kota salah satunya adalah pergaulan bebas, hal ini perlu diantisipasi melalui kegiatan bekerja sama dengan organisasi kepemudaan serta mengoptimalkan peran Karang Taruna dalam pemberdayaan generasi muda di kabupaten Sukoharjo.

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015 terimplementasikan melalui berbagai jenis program yang mencerminkan kebutuhan yang mendesak. Sejumlah program tersebut tidak seluruhnya dapat dipenuhi, mengingat keterbatasan potensi, dana, tenaga dan kemampuan manajerial. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemilihan guna tersusunnya program prioritas yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015 memuat program prioritas yang dikelompokkan dalam dua dimensi pembangunan yaitu pembangunan manusia dan daya dukung pembangunan manusia. Dimensi pembangunan manusia mencakup program-program prioritas pembangunan lingkup pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan. Sedangkan dimensi daya dukung pembangunan manusia meliputi program-program prioritas pembangunan lingkup pengelolaan data/informasi, kerjasama daerah, kesejahteraan sosial, dan pemerintahan yang baik.

Program Prioritas Kabupaten Sukoharjo dijabarkan ke dalam tabel berikut:

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		
NO	Dimensi Pembangunan	Program Prioritas
A	Pembangunan Manusia	
	1.	<i>Pendidikan</i>
		1 Penuntasan Pendidikan Dasar dan Peningkatan kualitas Pendidikan Menengah
		2 Pembinaan Potensi Unggul Generasi Muda
		3 Peningkatan Mutu Pendidikan Tenaga Kependidikan;
		4 Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan;
		5 Peningkatan Budaya Belajar (<i>Life Long Learning</i> , Minat baca)
	2.	<i>Kesehatan</i>
		1 Peningkatan akses dan kualitas Pelayanan Kesehatan
		2 Peningkatan Kecukupan Pangan dan Gizi
		3 Pengembangan Budaya Sehat (Lingkungan dan Perilaku)
	3.	<i>Ekonomi Kerakyatan/Pengentasan Kemiskinan</i>
		1 Pengembangan Infrastruktur Pedesaan
		2 Pengembangan Infrastruktur Perdagangan
		3 Penciptaan Iklim Yang Mendukung Investasi
		4 Pemasaran aktif
		5 Peningkatan Infrastruktur Pendukung Investasi

		6	Penyederhanaan Regulasi Bisnis
		7	Penciptaan Lingkungan Legal dan Regulasi Kondusif
		8	Peningkatan Kolaborasi Ekonomi
		9	Peningkatan skema pembiayaan beresiko
		10	Penataan Daerah Industri
		11	Pengembangan Insentif dan disinsentif
		12	Perbaikan Lingkungan Klaster
		13	Pengembangan Nilai Ekonomi Kegiatan Kreatif
		14	Peningkatan transaksi Industri Kreatif
		15	Fasilitasi Perolehan HKI
		16	Pengembangan Lembaga Keswadayaan Masyarakat
		17	Pembangunan Pelibatan Sumberdaya Masyarakat (Gotong Royong)
		18	Rehabilitasi Sumber Daya Air
		19	Peningkatan Produktitas dan Kualitas Hasil Pertanian
		20	Pemantapan Ketahanan Pangan
		21	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
B	Daya Dukung Pembangunan Manusia		
	1.	<i>Data/Informasi</i>	
		1	Penyempurnaan Data Kependudukan
		2	Pengembangan Data Tata Ruang
		3	Identifikasi Daya Dukung Alam
		4	Identifikasi Daya Dukung Infrastruktur Wilayah
		5	Penerapan Keterbukaan informasi
		6	Akses Data Antar SKPD
		7	Standarisasi Data
		8	Integrasi Data
		9	Identifikasi Pengetahuan Tradisional
	2.	<i>Kerjasama Daerah</i>	
		1	Penumbuhan Dialog Antar Wilayah
	3.	<i>Kesejahteraan Sosial</i>	
		1	<i>Rehabilitasi Sosial Ekonomi</i>
		2	Pengembangan Partisipasi Kelembagaan Peduli Pekat dan PMKS
		3	Penguatan Lembaga Perlindungan terhadap Kekerasan Berbasis Gender
		4	Perkuatan Forum Komunikasi Antar Umat
		5	Dukungan aktivitas Keagamaan
		6	Antisipasi Bencana Alam
		7	Pencegahan dan Pemulihan Bencana
	4.	<i>Good Governance</i>	
		1	Peningkatan Kapasitas Aparat Desa
		2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Kemitraan Desa
		3	Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Penyelenggaran Pemerintah
		4	Peningkatan Kapasitas Pengawasan dengan Penerapan Sistem <i>Reward and Punishment</i>
		5	Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat
		6	Peningkatan Tertib Bernegara

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

9.1. KAJIDAH INDIKATOR PENGUKUR

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah 2010-2015 dengan Visi, Misi dan Agenda Pembangunan yang sudah dirumuskan merupakan dasar penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik yang akan berdampak kepada kinerja sosial dan ekonomi masyarakatnya. Secara alami kebijakan publik kurang dapat diukur secara langsung, namun lebih dapat diukur secara tidak langsung melalui indikator makro sosial dan ekonomi yang bersifat komposit atau integralistik dari keluaran kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lainnya bahkan output program yang satu dengan program lainnya.

Dengan demikian, untuk mengevaluasi dampak kebijakan publik berupa kinerja dalam waktu yang telah berjalan, diperlukan beberapa indikator yang secara kuantitatif maupun kualitatif terukur. Sebelum menentukan indikator makro yang akan digunakan, terlebih dahulu perlu ditetapkan bahwa indikator-indikator tersebut memenuhi syarat kaidah pengukuran indikator yang “**SMART**” yaitu :

1. **Specific** (spesifik); dalam artian bahwa indikator yang digunakan harus spesifik, yakni sifat dan tingkat sasarannya dapat diidentifikasi dengan jelas;
2. **Measurable** (dapat diukur); indikator yang akan digunakan dapat dapat diukur, yakni target dan sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur;
3. **Achievable** (dapat dicapai); Indikator yang akan digunakan bersifat ”dapat dicapai” yakni target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;
4. **Relevant** (relevan); Indikator yang digunakan harus mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan yang ingin dicapai;
5. **Time Bound** (batas waktu); Indikator yang digunakan harus memiliki periode pencapaian sasaran yang ditetapkan pada jangka waktu pengukuran tertentu.

9.2. INDIKATOR VISI

Visi daerah yaitu “*Terwujudnya masyarakat Sukoharjo Yang Sejahtera, Maju dan Bermartabat Didukung Pemerintahan Yang Profesional.*”

Dapat diukur melalui dua indikator utama yaitu:

9.2.1. PDRB Perkapita

PDRB per kapita disajikan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Secara garis besar PDRB dijelaskan sebagai berikut:

- a) PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan per sektor perekonomian dari tahun ke tahun.
- b) PDRB atas dasar harga berlaku menurut penggunaan menunjukkan bagaimana produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar.
- c) PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.
- d) PDRB atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita

9.2.2. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu usia hidup, pengetahuan dan standar hidup layak. Pembangunan manusia yang berhasil akan membuat usia rata-rata masyarakatnya meningkat; usaha pembangunan juga ditandai dengan peningkatan pengetahuan yang bermuara di peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Pencapaian dua hal tersebut selanjutnya akan meningkatkan produktifitas sehingga akhirnya akan meningkatkan mutu hidup dalam arti hidup layak.

a. Usia Hidup;

Komponen ini diukur melalui pendekatan angka harapan hidup waktu lahir yang biasa dinotasikan dengan e^0 . Karena Indonesia tidak memiliki sistem vital registrasi yang baik, maka e^0 dihitung dengan metode tidak langsung. Metode ini menggunakan dua macam data dasar yaitu rata-rata anak yang dilahirkan hidup dan rata-rata anak yang masih hidup per wanita usia 15-49 tahun menurut kelompok umur lima tahunan.

b. Pengetahuan;

Komponen pengetahuan diukur melalui dua indikator, yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Sumber data kedua indikator ini adalah Sensus Penduduk dan Susenas. Angka melek huruf diolah dari variabel kemampuan membaca dan menulis sedangkan rata-rata lama sekolah dihitung menggunakan tiga variabel, yaitu partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan yang ditamatkan.

c. Standar Hidup Layak;

Indikator yang digunakan pada komponen ini adalah rata-rata per kapita riil yang disesuaikan. Masing-masing komponen tersebut terlebih dahulu dihitung indeksinya sehingga bernilai antara 0 (keadaan terburuk) dan 1 (keadaan terbaik).

9.3. INDIKATOR MISI

Upaya untuk merubah paradigma pembangunan, dari fokus pertumbuhan menjadi pemberdayaan seluruh masyarakat. Pemberdayaan tersebut meliputi peran serta masyarakat, penyelenggaraan administrasi publik, pertumbuhan ekonomi dalam kesinambungan demi pemerataan pendapatan. Untuk itu, lima misi pembangunan telah dirumuskan yang dapat diukur masing-masing indikator kinerja yang berguna sebagai bahan evaluasi dan masukan sehingga terwujud kerangka konstruksi meliputi:

9.3.1 MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN, KESEHATAN, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG TERUKUR, TERARAH DAN ADIL SERTA MEMPERHATIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN.

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan

- a. Angka Buta Huruf; menurunnya angka Buta Huruf dari 0,18% ditahun 2010 menjadi 0% di tahun 2015
- b. Angka Partisipasi Sekolah ;
 - 1. Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD dari 100,8 % di tahun 2010, menjadi 105 % di tahun 2015
 - 2. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs dari 99,79% di tahun 2010, menjadi 99,85% di tahun 2015
 - 3. Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMU/MA dari 44,97% di tahun 2010, menjadi 50% di tahun 2015
 - 4. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK dari 65,43% di tahun 2010, menjadi 68% di tahun 2015
- c. Angka Putus Sekolah
 - 1. Berkurangnya persentase drop out siswa SD dari 0,04% di tahun 2010 menjadi minimal 0,0% di tahun 2015
 - 2. Berkurangnya persentase *droup out* siswa SMP/MTs dari 0,17% siswa di tahun 2010, menjadi 0% di tahun 2015 Berkurangnya angka droup-out siswa SMA/MA/SMK, yang pada tahun 2010 sebanyak 0,18%, menjadi minimal 0% di tahun 2015

d. Kualitas pendidikan ;

1. Meningkatnya persentase kelulusan SMP/MTs, yang pada tahun 2009/2010 sebesar 95%. menjadi 98% di tahun 2015
2. Meningkatnya persentase lulusan SMA/MA, yang pada tahun 2009/2010 sebesar 62,75 %. Menjadi 78% di tahun 2015
3. Meningkatnya persentase lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK), yang pada tahun 2010 sebesar 99,72% menjadi 100% di tahun 2011
4. Meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2010 sebesar 82,82%. Menjadi maksimal 95 % di tahun 2015.

2. Peningkatan Kualitas Kesehatan

- a. Angka Harapan Hidup: Meningkatnya UHH dari 70,17 pada tahun 2010 menjadi 72 tahun pada tahun 2015
- b. Angka Kematian Bayi: Menurunnya AKB dari 10,18 KH pada tahun 2010 menjadi 8 KH pada tahun 2015
- c. Angka kematian Balita: AKABA dari 2/1000 Balita pada tahun 2010 menjadi 1,5/1000 Balita pada tahun 2015
- d. Angka kematian Ibu: AKI dari 80,41/100.000 KH pada tahun 2010 menjadi 75/100.000 KH pada tahun 2015.
- e. Cakupan Rumah sehat: Meningkatnya derajat “rumah tangga sehat” dari 68 % pada tahun 2010 menjadi 75 % pada tahun 2015.
- f. Status Gizi Buruk : Menurunnya status gizi buruk dari 5 % pada tahun 2010 menjadi 1 % pada tahun 2015
- g. Status Gizi Kurang : Menurunnya status gizi kurang dari 8,6 % pada tahun 2010 menjadi 5 % pada tahun 2015
- h. Desa Siaga Aktif : Meningkatnya Cakupan Desa Siaga Aktif dari 20 % pada tahun 2010 menjadi 55 % pada tahun 2015
- i. Incident Rate DBD : Menurunkan angka kesakitan DBD dari 39/100.000 pada tahun 2010 menjadi 20/100.000 pada tahun 2015
- j. CFR / Angka kematian DBD : Menurunkan angka kematian DBD dari 2,3 % pada tahun 2010 menjadi 2 % pada tahun 2015.
- k. Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) : Mempertahankan Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dari 95 % pada tahun 2010 dan 100 % pada tahun 2015

- l. Penemuan pasien baru TB BTA positif : Mempertahankan Cakupan Penemuan pasien baru TB BTA positif dari >85 % pada tahun 2010 dan > 85 % pada tahun 2015
- m. Ketersediaan obat sesuai kebutuhan : Mempertahankan Cakupan Pelayanan Ketersediaan obat sesuai kebutuhan dari 100 % pada tahun 2010 dan 100 % pada tahun 2015
- n. Peserta pelayanan KB : Mempertahankan Cakupan Pelayanan KB dari 75 % pada tahun 2010 dan 75 % pada tahun 2015

3. Pemberdayaan Perempuan Anak, Pemuda dan Olah Raga

- a. Tercapainya quota 30% perempuan dalam bidang legislatif
- b. Tercapainya quota 30% perempuan dalam jabatan birokrasi
- c. Tercapainya akses perempuan terhadap pendidikan dan lapangan kerja
- d. Tercapainya Kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan Perempuan
- e. Tercapainya upaya Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
- f. Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- g. Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
- h. Meningkatnya Pembinaan terhadap Anak Terlantar.
- i. Meningkatnya pembinaan terhadap anak jalanan
- j. Meningkatnya perlindungan terhadap anak dari tindakan eksploitasi

4. Peningkatan Infrastruktur

- a. Persentase rumah dengan fasilitas tertentu (penerangan listrik dan air bersih) Meningkatnya cakupan pelayanan listrik yang digambarkan oleh meningkatnya persentase Rumah Tangga dengan penerangan listrik
- b. Menurunnya persentase Rumah Tangga dengan sumber Air Bersih dari Mata Air Tak Terlindung
- c. Meningkatnya prosentase perumahan yang layak huni: Dinding permanen 77,46% di Tahun 2010 menjadi 82% di Tahun 2015
- d. Persentase jalan dalam kondisi baik;
 - 1. Meningkatnya permukaan jalan kabupaten dalam kondisi mantap (kondisi baik dan sedang) dari 50,01% (tahun 2010) % menjadi minimal 70 % tahun 2015.
 - 2. Meningkatnya persentase perbandingan panjang jalan dengan luas wilayah

3. Bertambahnya panjang jembatan yang dapat dilewati kendaraan
- e. Tingkat aksesibilitas dan mobilitas wilayah
Meningkatnya kecepatan rata-rata layanan jalan kabupaten
- f. Tingkat Fungsional daerah Irigasi dan Ketersediaan Air Baku
 1. Meningkatnya persentase tingkat fungsional daerah irigasi terhadap lahan potensial dari 38% (2010) menjadi 73 % tahun 2015.
 2. Meningkatnya ketersediaan air baku untuk irigasi dan air bersih
 3. Meningkatnya intensitas produksi pada daerah irigasi teknik.
 4. Meningkatnya pengendalian dan pemanfaatan air baku dari 38% pada tahun 2010 menjadi 73% pada tahun 2015

5. Penataan Ruang

- a. Berkembangnya model perencanaan dan pemanfaatan ruang secara optimal
- b. Terkonsolidasinya perencanaan tata ruang
- c. berkembangnya sistem informasi tata ruang untuk kepentingan pengawasan dan pengaturan
- d. Meningkatnya konsistensi dalam pengaturan dan pemanfaatan tata ruang
- e. Meningkatnya usaha-usaha perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup di semua sektor pembangunan
- f. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam usaha pelestarian lingkungan hidup
- g. Meningkatnya pelaksanaan AMDAL dalam pelaksanaan pembangunan
- h. Penurunan jumlah kasus pelanggaran Perda Penataan Ruang Daerah;
- i. Penurunan Jumlah kasus pencemaran lingkungan;
- j. Peningkatan kejelasan Status Kepemilikan Tanah,
- k. Menurunnya diviasi penggunaan ruang dari Perda Tata Ruang

6. Pemberdayaan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

- a. Menurunnya persentase penduduk miskin dari 36,7% pada tahun 2010 menjadi 28% pada tahun 2015.

9.3.2. MEMBANGUN MANAJEMEN PEMERINTAH YANG PROFESIONAL, BERSIH DAN YANG BERBASIS PADA PELAYANAN MASYARAKAT

- a. Jumlah Peraturan Daerah yang partisipatif dan responsif yang dihasilkan;
- b. Tingkat sinkronisasi hukum di daerah (antara peraturan daerah kabupaten Sukoharjo satu dengan peraturan daerah Kabupaten Sukoharjo lainnya, dan antar peraturan daerah propinsi dengan peraturan tingkat nasional).
- c. Jumlah dan kualitas peranan kelompok sadar hukum;
- d. Efektivitas dan efisiensi pelayanan publik yang dilakukan aparatur pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- e. Tingkat kemampuan otonomi desa yang semakin meningkat;

9.3.3. MEWUJUDKAN KONDISI MASYARAKAT YANG AMAN, TENTRAM, DEMOKRATIS DAN DINAMIS.

- a. Jumlah kasus pelanggaran HAM yang berhasil diungkapkan dan dilakukan penegakan hukum.
- b. Luasnya terpaan informasi hukum di kalangan masyarakat
- c. Kualitas peranan partai politik dalam mengembangkan demokrasi di Kabupaten Sukoharjo;
- d. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan antara lain :
 - i. Terbinanya, terlatihnya, terdidiknya dan terkerahkannya anggota Hansip/Linmas dengan target 2015 sebesar 100%.
- e. Pengendalian keamanan lingkungan.
 - i. Terlaksananya pemantauan situasi daerah dengan target 2015 sebesar 100%.
 - ii. Terlaksananya laporan cepat dan diteksi dini situasi daerah.
- f. Monitoring dan pendataan orang asing dan tenaga kerja asing dalam rangka menjaga stabilitas keamanan.
 - i. Terpantaunya keberadaan dan kegiatan orang asing dan tenaga kerja asing di Wilayah Kabupaten Sukoharjo dengan target 2015 sebesar 100%.
- g. Pembinaan dan fasilitasi forum kewaspadaan dini masyarakat dan forum kegiatan sejenisnya dalam upaya keamanan dan ketertiban masyarakat.

- i. Terselenggaranya sosialisasi dan fasilitasi forum kewaspadaan dini masyarakat dan sejenisnya di 12 kecamatan.
- h. Pengamanan hari-hari besar keagamaan dan hari-hari besar lainnya.
 - i. Terlaksananya pengamanan hari-hari besar keagamaan dan hari besar lainnya.
- i. Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan masalah sosial.
 - i. Terwujudnya situasi daerah yang aman dan kondusif.

9.3.4. MEMBERDAYAKAN EKONOMI RAKYAT DENGAN MENGEMBANGKAN PELAKU EKONOMI YANG MAMPU MEMANFAATKAN KEUNGGULAN POTENSI LOKAL

- a. Meningkatnya produktivitas perkapita tenaga kerja pertanian menjadi minimal sama dengan standar kebutuhan minimum di tahun 2015
- b. Meningkatnya tingkat pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dari 4,92% pada tahun 2009 menjadi minimal 5% pada tahun 2015
- c. Meningkatkan pendapatan per kapita Kabupaten Sukoharjo dari Rp.10.621.130,06 pada tahun 2009 menjadi minimal Rp 15.554.195,00 pada tahun 2015
- d. Menurunkan tingkat pengangguran terbuka
- e. Meningkatnya volume dan nilai Ekspor
- f. Meningkatnya peran sektor industri dalam PDRB dari sekitar 3,67 % pada tahun 2009 menjadi minimal 4,3% pada tahun 2015
- g. Menguatnya peran institusi ekonomi masyarakat dalam peningkatan kinerja ekonomi daerah
- h. Meningkatnya kapasitas institusi pemerintah dalam fasilitasi pengembangan institusi ekonomi rakyat
- i. Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM yang sehat, tangguh dan mandiri tahun 2009/2010 sebesar 2 % , tahun 2015 menjadi 15 %.

9.3.5. MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA DAN BERMASYARAKAT

- a. Tersedianya bantuan untuk rehabilitasi rumah ibadah
- b. Meningkatkan pelayanan dan kemudahan umat dalam melaksanakan ibadah
- c. Tersedianya bantuan dana untuk da'i dan guru ngaji serta bantuan siswa ngaji.

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1 Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 (Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016) yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2016 serta dengan mengingat waktu yang sangat sempit bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada langsung Tahun 2015 untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2020 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016, maka Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 sesuai dengan jadwal dengan agenda menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam Tahun 2016. Selanjutnya Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2015 tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 yang sudah disusun untuk pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih baik.

10.2 Kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pembangunan, diterapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntable dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian vis dan misi yang tertuang dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015. Pelaksanaan kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka anggaran harus memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan yang melekat pada masing-masing unit kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015 merupakan pedoman atau acuan bagi unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo maupun masyarakat termasuk dunia usaha dalam pelaksanaan program pembangunan sehingga tercapai sinergi antar pelaku pembangunan dalam rangka pencapaian visi Kabupaten

Sukoharjo. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan, sebagai berikut :

- a) Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015 dengan sebaik-baiknya.
- b) Sebagai implementasi pelaksanaan RPJMD, maka Pemerintah Kabupaten Sukoharjo wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen operasional pelaksanaan pembangunan tahunan sebagai acuan dalam penyusunan APBD Kabupaten Sukoharjo.
- c) Bagi Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Kabupaten Sukoharjo. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tiap program maka dalam kerangka koordinasi perencanaan masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, wajib membuat Rencana Strategi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RENSTRA SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan. Selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD) yang merupakan implementasi tahunan dari Renja SKPD sebagai dasar dalam penyusunan APBD Kabupaten Sukoharjo.
- d) Masyarakat termasuk dunia usaha dapat berperanserta dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya akan dituangkan dalam produk Peraturan Daerah. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan masyarakat termasuk dunia usaha dapat berperanserta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan berdasarkan rencana peranserta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.
- e) Pada akhir tahun Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur APBD dan peraturan lainnya.

- f) Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan serta tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil kepada Bupati Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran maka Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah 2010–2015.

Selanjutnya Bupati dan Penyelenggara pemerintahan akan melaksanakan program pembangunan sesuai dengan program yang telah dituangkan dalam RPJMD 2010–2015. Dalam kaitan itu maka Pemerintah, DPRD dan masyarakat perlu memberikan dukungan sepenuhnya agar program-program tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju, dan disiplin dari semua pihak.

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA